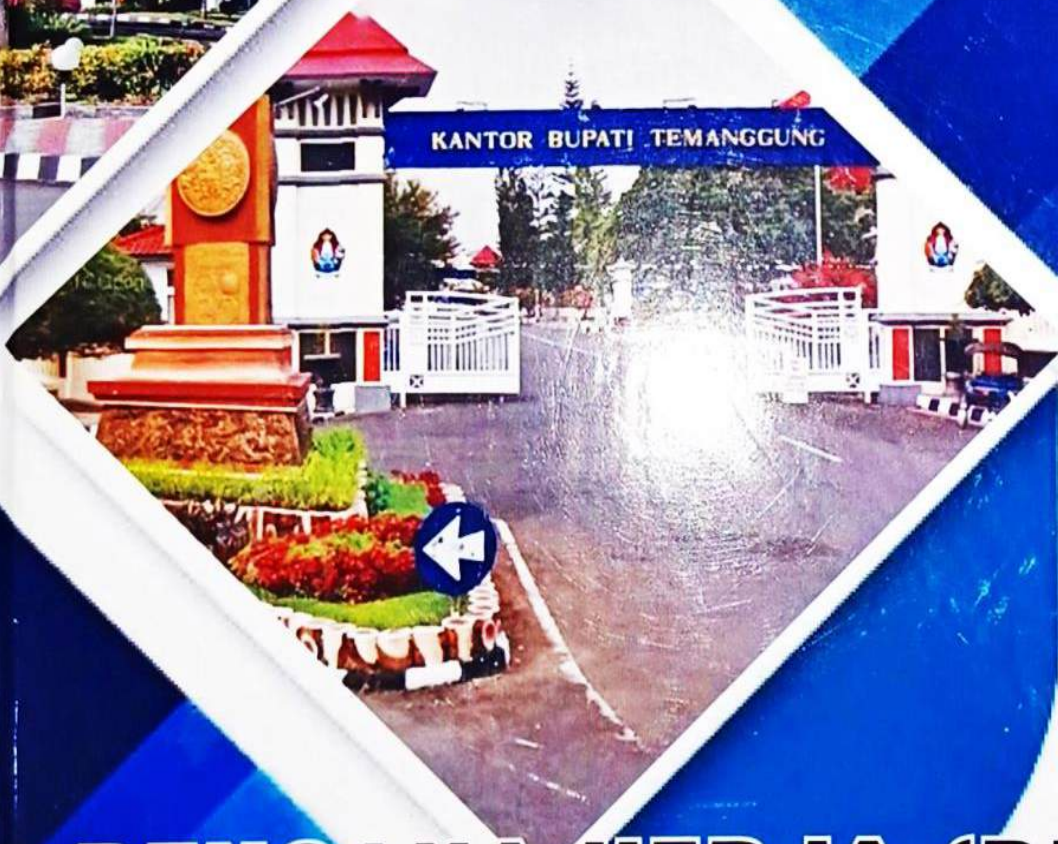




RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

HALAMAN VERIFIKASI

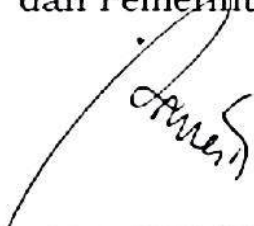
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



Petugas Verifikator



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004

EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 196811171990031002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Karena hanya atas rahmat dan berkah-Nya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung serta diajukan ke dalam RKPD Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2024.

Disadari bahwa substansi dokumen Renja SETDA ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan untuk dapat ditetapkan di Renja tahun berikutnya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap dokumen Rencana Kerja tahun 2024 untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dari Sekretariat Daerah sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Temanggung khususnya dalam menangani pelayanan Administrasi Pemerintahan di daerah. Selanjutnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Temanggung, 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196801191993111001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	63
2.3. Data Pokok	93
2.4. <i>Review</i> terhadap rancangan awal RKPD	138
2.5. Inovasi Perangkat Daerah	157
2.6. Penghargaan	157
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	158
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	158
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	158
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	164
4.1. Program dan Kegiatan	164
BAB V PENUTUP	196

DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s.d. Tahun 2022	11
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2023.....	35
3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung	64
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	141
5. Tujuan, sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	159
6. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	165
7. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	170

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

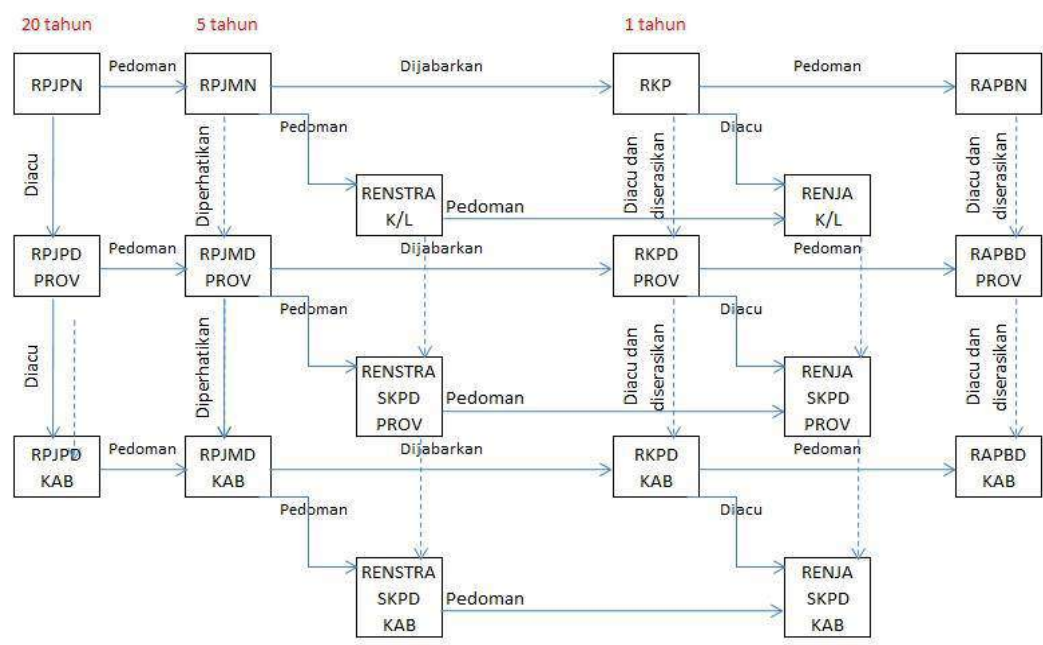
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Kondisi pelayanan Sekretariat Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah;
- 4) Data Pokok Pembangunan Sekretariat Daerah;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat Daerah;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat Daerah untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan renstra Sekretariat Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Sekretariat Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Sekretariat Daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Sekretariat Daerah. Namun dalam proses ini Sekretariat Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting

terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
s.d Tahun 2022

Bagian Pemerintahan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					TW 4 2022 (%)	STATUS			CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		T	A	U		T	A	U						
FUNGSI PENUNJANG : SEKRETARIAT DAERAH																											
	INDIKATOR SASARAN																										
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	angka	3,35	3,3	3,35	3,40	3	4	3,35	3,35	3,35	3,35		97,10	T	T		95,71		A	T		Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	Penilaian dari Kementerian	Tertibnya administrasi di Bagian Pemerintahan	Keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, capaian kinerja dari OPD belum maksimal	melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan BKPSDM
	INDIKATOR PROGRAM																										
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	62,74	75	75	100	100	100	100	100	100	100		100,00	T	T		100,00	T	T		Rumus penghitungan dari cakupan pilar batas yang terinventarisir adalah Jumlah Pilar yang	pilar batas yang terinventarisir adalah pilar batas antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten	- Data pilar batas telah tercukupi - Bantuan dari Pemda yang berbantuan dlm Kgt.Inventarisasi	Keterbatasan anggaran yang tersedia,Batas hilang terbawa arus sungai,lokasi sulit dijangkau ,pindahnya arus sungai yang	Melakukan pengecekan Pilar Batas dan koordinasi dengan Kab.Magelang	

																					terinventarisir dan telah dilakukan pengecekan langsung di lokasi dibagi jumlah pilar batas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.	lainnya yang sudah dilakukan pengecekan kondisi pilar batas di lokasi sesuai yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri	i pilar batas	menjadi batas wilayah		
		Jumlah Pilar Batas yang terinventarisir								4	51	61	61	61												
		Jumlah total Pilar batas sesuai Permendagri								4	51	61	61	61												
	Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	93,33	100	100	100	100	100	83,33	100,00	100	100		100,00	T	T		100,00	T	T		jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu	Tepat waktu yang dimaksud adalah tidak melebihi tanggal	Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang	Adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian	Melakukan koordinasi secara lisan dan tertulis dengan perangkat
		Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu								5	6	6	7													

		Jumlah Perangkat Daerah Pengampu SPM							6	6	6	7										dibagi Jumla h Perang kat Daerah yang menga mpu SPM	10 pada bulan setelah tahun anggara n berakhi r.	menga mpu SPM	SPM,data yang kurang lengkap	at daerah pengam pu SPM	
	Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	95	100	100	100	100	100	90, 00	95,0 0	100	100			T T			100, 00	T T			jumlah Kecam atan yang mengir imkan Lapora n	Tepat waktu yang dimaks ud adalah tidak melebi h	Telah diamo nkan dalam PP No.17 Tahun 2018	Lambatny a penyamp aian laporan bulanan dari Kecamata n,kurang lengkapn ya data	Melakuk an kordina si secara lisan dan tertulis dengan Kecamat an	
		Jumlah Kecamatan tertib administrasi							18	19	20	20									Bulana n Camat tepat waktu dan lengka p	i tanggal 10 (sepulu h) pada bulan berikut nya					
		Jumlah Keseluruhan kecamatan							20	20	20	20									Camat tepat waktu dan lengka p dibagi jumlah Kecam atan di Kabup aten Teman gung						
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1													97,1 0	1	0	0	95,71	0	1	0				
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			3													100, 00	3	0	0	100,00	3	0	0				
JUMLAH IKPD			4													98,5 5	4	0	0	97,86	3	1	0				

Bagian Kesra dan Bina Mental

N o	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (S/D Th2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi per Triwulan Th. 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15	16,00	17	18	19	20	21	22	23
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	Presentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.	%	90	0	58	28.972.326.431	88	41.333.121.000	36.024.211.200	89,00	9.145.437.695	89,00	12.994.655.540	90,34	5.895.517.206	0,00	7.378.007.332	90,34	35.413.617.773	100	98,31
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksanya kegiatan olahraga di lingkungan Setda, terselenggaranya kegiatan MTQ, terselenggaranya kegiatan keagamaan	Kegiatan	0	0	1	0	3	900.000.000	785.000.500	1,00	61.237.000	1,00	163.771.925	0,50	70.003.531	0,50	344.364.911	3,00	639.377.367	100	81,45
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan penyantunan sosial di kab. temanggung	kegiatan	0	0	1	0	1	39.533.121.000	34.603.121.000	0,25	9.084.200.695	0,40	12.604.043.347	0,10	5.625.594.377	0,25	7.022.242.421	1,00	34.336.080.840	100	99
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	terfasilitasinya penyelenggaraan ibadah haji dan TPHD	kegiatan	0	0	1	0	1	900.000.000	636.089.700	0,00	0	0,70	226.840.268	0,30	199.919.298	0	11.400.000	1,00	438.159.566	100	69
	Jumlah				0	3	0		41.333.121.000	36.024.211.200		9.145.437.695		12.994.655.540		5.895.517.206		7.378.007.332	5	35.413.617.773		
																		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	98,31	
																			Predikat			

Bagian Hukum

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			57,5	1.099.999.900	1.641.328.000		15.459.400								15.459.400		0,94
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	30			100								100		333,33	
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100			100								100		100	
		Presentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	90			100								100		100	
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%	75			100								100		100	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah (perda dan Perbup)	jumlah produk hukum yang difasilitasi	100	99.999.900	99.999.900	38	4.033.000	15	18.122.500	4	39.940.500	100	22.871.575	157	84.967.575	157	84,97
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tertanganinya sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	permasalahan	30	750.000.000	1.591.328.100	9	4.707.600	8	237.914.770	10	260.002.450	13	947.244.496	40	1.449.869.316	133	91,11

		Tersedianya data RANHAM dan KKP HAM	dokumen	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	100	0
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH	bulan	12	250.000.000	50.000.000	3	6.718.800	3	6.751.600	3	7.481.200	3	24.849.400	12	45.801.000	100	91,60
JUMLAH					1.099.999.900	1.741.328.000		15.459.400		262.788.870						1.580.637.891		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																	100	90,77
PREDIKAT																	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																	100	
PREDIKAT																	Sangat Tinggi	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya	: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA

Bagian Pembangunan

Kode Rekening	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi per Triwulan Th. 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022	
									I		II		III		IV					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH																			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																			
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang selesai tepat waktu	%	100		100			0		14,5		19,33		100		100		100	
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100		100			100		100		100		100		100		100	
		Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	100		100			100		100		100		100		100		100	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaporan Pembangunan yang tepat waktu	Laporan	12	250.000.000	12	230.000.000	230.000.000	3	33.732.694	3	22.422.332	3	26.271.056	3	134.218.197	12	216.644.279	100	94,19
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	Dokumen	1	85.000.000	1	75.000.000	75.000.000	0	1.960.500,00	0	3.021.000,00	0	10.680.519	1	51.833.025	1	67.495.044	100	89,99
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan	4	165.000.000	4	155.000.000	155.000.000	1	31.772.194,00	1	19.401.332,00	1	15.590.537	1	82.385.172	4	149.149.235	100	96,23

	Program Pembangunan																			
		Pemeliharaan Aplikasi Simpelbangda	Kegiatan	1		1			1		0		0		0		1		100	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan	Kegiatan	4		4			1		1		1		1		4		100	
		Terverifikasi ya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	%	100		100			5		35		40		20		100		100	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																			94,2	
Predikat																			Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Program																			100	
PREDIKAT																			Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				: kedisiplinan, koordinasi dan tanggung jawab																
Faktor penghambat pencapaian kinerja				: fasilitas komputer kurang memadai dan kurangnya jumlah sumber daya manusia																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya				: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																

Bagian Perekonomian

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2022			Realisasi per Triwulan Tahun 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022	
							I		II		III		IV					
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah				833,000,000	2,099,831,500		65,516,586		77,752,302		426,580,881		427,016,730		569,849,769	366.67	
		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100.00							100				100.00		100.00	
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100.00							100				100.00		100.00	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	66.67							50.00				50.00		75.00	
a	Koordinasi sinkronisasi monitoring dan evalusai kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya kegiatan fasilitas Pembinaan dan Evaluasi BUMD	Kegiatan	6	271,000,000	90,716,000	2	19,205,193	1	10,473,579	2	26,330,579	1	31,178,534	6	87,187,885	100	96.11
b	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	kegiatan	3	280,000,000	1,954,115,500	1	29,121,450	1	62,672,144	1	382,761,223	1	386,513,310	4	861,068,127	133	44.06
c	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Produksi Daerah	kegiatan	3	282,000,000	55,000,000	1	17,189,943	1	4,606,579	1	17,489,079	1	9,324,886	4	48,610,487	133	88.38
		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program															122.22	
		Predikat															Sangat Tinggi	

JUMLAH	833,000,000	2,099,831,500		65,516,586		77,752,302		426,580,881		427,016,730		996,866,499		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH													122.22	47.47
PREDIKAT													Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH													91.67	
PREDIKAT													Telah Tercapai	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan													
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Keterbatasan kompetensi aparatur													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan III dalam rangka tercapainya target kinerja													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya	: Direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA													

Bagian PBJ

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022	
	PROGRAM/	PROGRAM/ KEGIATAN					I		II		III		IV					
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.01.03.2.03	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah				1.300.000.000	452.859.000		51.685.434		31.881.152		137.721.504		122.095.043		343.383.133		75,83
		Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100			1,75		11,63		85,93		100		100,00		100	
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100			7,14		17,41		33,33		100		100,00		100	
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	50			0,15		0,77		25,26		96,51		96,51		100	

401.20.0 01	Pelaksanaan ULP dan LPSE (Tahun 2019)	- Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu - Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu - Presentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.03.2 .03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Tahun 2020- 2023)	Fasilitasi Persiapan Pengadaan	bulan	12	425.000.000	200.000.000	3	20.639.240	3	14.394.495	3	49.944.050	3	26.874.374	12	111.852.159	100	55,93
		Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Tender/Penunju kan Langsung	paket	130			2		13		107		8		130		100	
4.01.03.2 .03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Tahun 2020- 2023)	Pengadaan hardware dan sarana pendukung LPSE	paket	1	550.000.000	152.859.000	0,25	31.046.194	0,25	16.993.407	0,25	41.597.154	0,25	50.810.669	1	140.447.424	100	91,88
4.01.03.2 .03.03	Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Tahun 2020- 2023)	Peningkatan kapasitas pelaku pengadaan PA, PPK PPHP, Pelaku Usaha	kegiatan	1	325.000.000	100.000.000	0	0	0,5	493.250	0,25	46.180.300	0,25	44.410.000	1	91.083.550	100	91,08
		Peningkatan kompetensi pengelola pengadaan	kegiatan	1			0		0,5		0,25		0,25		1		100	

		Fasilitasi Advokasi dan Manajemen Resiko Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	1			0		0,5		0,25		0,25		1		100	
			JUMLAH		1.300.000.000	452.859.000		51.685.434		31.881.152		137.721.504		122.095.043		343.383.133		
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH							100	75,83
																PREDIKAT	Sangat Tinggi	
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH							100	
																PREDIKAT	Telah Tercapai	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan															
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan I dalam rangka tercapainya target kinerja															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA															

Bagian Organisasi

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.01.01	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP	%	70,2	75.000.000	114.455.500	100,00	6.072.300	0,00	21.673.805	0,00	21.882.989	0,00	64.237.900	100,00	113.866.994	100,00	99,49
4.01.01.2.1 3.01	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen Perda dan Perbup SOTK	Dokumen	2	25.000.000	65.000.000	0,50	118.000	1	5.105.465	0,50	3.964.000	0,50	55.774.500	2,00	64.961.965	100	99,94
4.01.01.2.1 3.02	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah kegiatan Bimtek Pelayanan Prima	kegiatan	1	25.000.000	24.455.500	0,50	5.694.300	0,25	5.311.340	0,25	6.479.739	0	6.928.000	1,00	24.413.379	100	99,83
4.01.01.2.1 3.03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen LKjIP dan PK Bupati yang disusun	Dokumen	2	25.000.000	25.000.000	1,00	260.000	1	11.257.000	0	11.439.250	0	1.535.400	2,00	24.491.650	100	97,97
	JUMLAH				75.000.000	114.455.500	6.072.300		21.673.805		21.882.989		64.237.900		113.866.994			
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																100	99,49
PREDIKAT																	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																	100,00	99,49
PREDIKAT																	Telah Tercapai	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan															
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan IV dalam rangka tercapainya target kinerja															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA															

Bagian Umum

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target 2022			Realisasi per Triwulan Th. 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022	
							I		II		III		IV					
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	15.845.196.000	13.960.210.856	25	3.011.781.851	25	3.928.431.763	25	3.731.550.201	25		100	10.671.763.815	100,00	76,44
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah																	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Sekretariat Daerah	bulan	12	4.000.000		3		3		3		3		12			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah	bulan	12	3.000.000		3		3		3		3		12			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	15.072.515.664	13.790.333.906	3	2.975.606.426	3	3.880.509.688	3	3.683.628.126	3		12	10.539.744.240	100,00	76,43
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN	bulan	12	15.072.515.664	13.790.333.906	3	2.975.606.426	3	3.880.509.688	3	3.683.628.126	3	2.906.936.943	12	13.446.681.183	100,00	97,51
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			12	772.680.336	169.876.950	3	36.175.425	3	47.922.075	3	47.922.075	3		12	132.019.575	100,00	77,71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	bulan	12	772.680.336	169.876.950	3	36.175.425	3	47.922.075	3	47.922.075	3	36.175.425	12	168.195.000	100,00	99,01
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1				100,00	98,26	
																Predikat	Tinggi	

B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Kepala Daerah	%	100	14.959.800.702	13.137.228.112	25	1.809.487.657	50	2.313.921.395	75	2.925.550.747				12.347.295.839		93,99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				289.590.900	0												
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	0	79.590.900		0								0	0	0,00	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0	210.000.000		0								0	0	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			84	4.399.976.250	3.859.925.100	21	664.032.918	21	700.440.720	21	553.604.001	21	1.816.377.045	84	3.734.454.684	100	96,75
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	bulan	12	199.996.850	149.995.500	3	0	3	11.979.000	3	65.366.550	3	63.052.220	12	140.397.770	100,00	93,60
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa	bulan	12	249.997.000	199.995.500	3	3.200.000	3	61.996.987	3	83.468.009	3	48.375.967	12	197.040.963	100,00	98,52
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12	200.000.000	149.999.300	3	0	3	33.265.560	3	68.253.790	3	45.707.580	12	147.226.930	100,00	98,15
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	300.000.000	260.000.000	3	0	3	56.857.600	3	26.142.023	3	158.215.900	12	241.215.523	100,00	92,78

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan referensi Peraturan	bulan	12	49.983.400	49.928.300	3	7.677.500	3	8.732.500	3	7.259.999	3	6.872.500	12	30.542.499	100,00	61,17
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan	bulan	12	2.000.000.000	2.250.000.000	3	523.227.000	3	432.714.100	3	37.628.000	3	1.256.327.900	12	2.249.897.000	98,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya kebutuhan Konsultasi dan Koordinasi	bulan	12	1.399.999.000	800.006.500	3	129.928.418	3	94.894.973	3	265.485.630	3	237.824.978	12	728.133.999	100,00	91,02
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33	374.995.352	279.735.000	0	0	0	0	33	146.750.000	0	123.740.000	33	270.490.000	100	96,70
	Pengadaan Mebel	Tercukupinya meubeleur	unit	0	199.997.300	0	0		0						0	0	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya peralatan dan mesin lainnya	unit	33		279.735.000	0		0		33	146.750.000	0	123.740.000	33	270.490.000	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	bulan	0	174.998.052	0	0		0				0		0	0	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			48	4.874.994.000	4.674.804.472	12	924.501.059	12	1.009.088.483	12	1.084.935.162	12	1.141.017.341	48	4.159.542.045	100	88,98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	15.000.000	15.000.000	3	1.500.000	3	1.675.000	3	1.500.000	3	6.500.000	12	11.175.000	100,00	74,50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik, Telepon, dan Air	bulan	12	1.200.000.000	1.098.400.000	3	220.221.944	3	235.194.689	3	259.330.031	3	278.567.642	12	993.314.306	100,00	90,43

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	160.000.000	119.994.000	3	13.600.000	3	21.050.000	3	53.944.000	3	30.800.000	12	119.394.000	100,00	99,50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada jasa pelayanan perkantoran, jasa pengamanan Gedung Kantor, Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	3.499.994.000	3.441.410.472	3	689.179.115	3	751.168.794	3	770.161.131	3	825.149.699	12	3.035.658.739	100,00	88,21
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72	2.229.841.200	1.918.837.540	18	99.813.680	18	353.366.867	18	360.939.584	18	1.000.746.085	72	1.814.866.216	100	94,58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 157 unit	bulan	12	250.000.000	250.000.000	3	0	3	54.087.353	3	73.372.747	3	117.275.007	12	244.735.107	100,00	97,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	bulan	12	749.993.900	691.591.000	3	96.298.680	3	111.241.342	3	227.084.953	3	207.102.568	12	641.727.543	100,00	92,79
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan meubel	bulan	12	74.945.000	29.985.740	3	1.550.000	3	0	3	8.500.000	3	17.038.500	12	27.088.500	100,00	90,34

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya	bulan	12	274.997.300	99.990.700	3	1.965.000	3	13.412.000	3	18.673.000	3	47.077.880	12	81.127.880	100,00	81,14
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tepeliharanya aset tetap lainnya	bulan	12	24.914.800	19.903.600	3	0	3	19.500.000	3	0	3	0	12	19.500.000	85,00	97,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan serta bangunan lainnya	bulan	12	854.990.200	827.366.500	3	0	3	155.126.172	3	33.308.884	3	612.252.130	12	800.687.186	85,00	96,78
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			115	2.790.403.000	2.403.926.000	9	121.140.000	50	251.025.325	47	779.322.000	9	1.216.455.569	115	2.367.942.894	100	98,50
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati	unit	36	350.000.000	335.964.000	3	75.000.000	24	84.064.000	6	75.000.000	3	101.854.404	36	335.918.404	95,20	99,99
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah Tangga Wakil Bupati	unit	67	314.000.000	317.983.500	3	44.000.000	23	105.490.500	38	81.352.500	3	83.840.000	67	314.683.000	94,00	98,96
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah	bulan	12	2.126.403.000	1.749.978.500	3	2.140.000	3	61.470.825	3	622.969.500	3	1.030.761.165	12	1.717.341.490	100,00	98,14
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1					100,00	95,10
																Predikat	Sangat Tinggi	

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

N O	BIDANG/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN TAHUN 2022								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		
							TW I		TW II		TW III		TW I						
				K	Renja	DPA	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani	%	100			100		100		100				100		100		
1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
a	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Stell	40	249.250.000	249.176.000	1	3.850.000	2	6.809.000	26	59.050.200	11	177.471.920	40	247.181.120	100	99,20	
b	Peaksanaan Medical Check Up	Terlaksananya medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	kegiatan	4	40.000.000	40.000.000	0	0			2	9.000.000	0	12.560.500	2	21.560.500	50	53,90	
c	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	300	600.000.000	600.000.000	37	88.000.000	72	310.650.943	246	128.600.000	19	70.450.000	374	597.700.943	100	99,62	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM																		83,33	
PREDIKAT																		Tinggi	

2	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																	
a	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Terpenuhinya Kebutuhan Kedinasan kepala Daerah, Belanja Penunjang operasional Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggarany a kegiatan Keprotokolan)	Kegiatan	800	950.000.000	952.414.500	333	45.763.200	121	331.085.758	636	242.576.043	39 9	321.272.262	1489	940.697.263	100	98,77
b	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Tersedianya Naskah Pidato dan sambutan Pimpinan Daerah, Informasi pimpinan daerah melalui website, Media Sosial, Media Masa, Media Luar Ruangan, serta terjalinnya hubungan baik dengan berbagai pihak terkait dengan juru bicara pimpinan dan tersedianya perjalanan dinas Kepala Daerah dan	data/info rmasi/ berita	2000	1.955.000.000	1.350.500.000	601	130.160.418	634	233.268.204	661	424.218.872	80 8	562.525.933	2704	1.350.173.427	100	99,98

		Wakil Depala Daerah)																
c	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	umlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Tersedianya Notulen rapat, Dokumentasi foto Video Kegiatan Pimpinan Daerah, Tersedianya naskah Perss release dan fasilitasi peliputan media kegiatan Pimpinan Daerah)	kegiatan/ release	800	746.750.000	791.750.000	450	33.697.893	248	118.350.993	237	76.337.100	366	551.418.703	1301	779.804.689	100	98,49
Jumlah					3.651.750.000	3.094.664.500	1.384	209.621.511	1.003	682.704.955	1.534	743.132.015	1.573	1.435.216.898	5.494	3.070.675.379		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM																	100,00	
PREDIKAT Sangat Tinggi																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM																	91,67	99,22
PREDIKAT Sangat Tinggi																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																	95,83	
PREDIKAT Sangat Tinggi																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya																		

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
s.d Triwulan I Tahun 2023

Bagian Pemerintahan

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
							I		II		III		IV						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	16
A	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				510,000,000	445,401,800		156,638,950								152,423,450			
		Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	%	100			100								100.00		100.00		
		Persentase pelaporan SPM perangkat Daerah tepat waktu	%	100			100								100.00		100.00		
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	100			100								100.00		100.00		
a	Administrasi Tata Pemerintahan				505,000,000	394,597,800		148,207,950									37	19	
1	Penataan Administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Pemerintahan	Dokumen	1	20,000,000	11,755,400	0	828,200							0	828,200	0	7.05	
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	2	10,000,000	12,140,000	1	1,120,000							1	1,120,000	50	9.23	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	5	475,000,000	370,702,400	3	146,259,750							3	146,259,750	60	39.45	
b	Fasilitasi Kerjasama Daerah				5,000,000	25,402,000		4,215,500							0		58	17	
1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	5,000,000	25,402,000	7	4,215,500							7	4,215,500	58	16.60	
			JUMLAH			445,401,800		156,638,950								152,423,450			

																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	47.50	34.22	
																	PREDIKAT	Sangat Tinggi		
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH										100.00		

Bagian Hukum

No	Bidang/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
							I		II		III		IV						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
A	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT				1,628,716,000	1,448,910,800													
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																		
		Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklan juti dengan Peraturan Bupati	%	30															
		Persentase Permasala han Hukum yang diselesaika n secara Litigasi	%	17															
		Persentase Permasala han Hukum yang diselesaika n secara Non Litigasi	%	83															

		Persentase Dokumentasi Perundangan melalui JDIH	%	100														
a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	111	100,000,000	50,000,000	14	3,665,500						14	3,665,500	12.61	7.331	
b	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	30	1,442,000,000	1,353,172,000	9	226,940,000						9	226,940,000	30	16.771	
c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	111	86,716,000	45,738,800	3	9,739,948						3	9,739,948	2.703	21.295	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																15.11	15.132	
Predikat																Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																		
Predikat																		

Bagian Kesra dan Bina Mental

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
							I		II		III		IV						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	16
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.	%	90	35,739,411,500	34,220,500,000									90.95	58,216,719	100	0.17	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan	3	750,000,000	492,019,000	1.00	11,075,412							1.00	11,075,412	33.33	2.25	
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	kegiatan	1	34,231,411,500	33,128,481,000	0.10	41,169,557							0.10	41,169,557	10.00	0.12	
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan	kegiatan	1	758,000,000	600,000,000	0.10	5,971,750							0.10	5,971,750	10.00	1	

		Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas																	
	Jumlah				35,739,411,500	34,220,500,000		58,216,719		0		0		0	1	58,216,719			0
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	17.78	0.17	
																Predikat			
																Rata-rata Capaian Kinerja Program(%)	100		
																Predikat			

Bagian Perekonomian

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023 (%)		Ket.
							I		II		III		IV						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
1	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah				1,106,744,500	976,744,500		35,927,046		0		0		0		35,927,046	95.00		
		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100.00			100.00								100.00		100.00		
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100.00			100.00								100.00		100.00		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	80			80.00								80.00		100.00		
a	Koordinasi sinkronisasi monitoring dan evalusai kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya kegiatan fasilitas Pembinaaan dan Evaluasi BUMD	Kegiatan	4	177,716,000	77,716,000	1	15,945,898							1	15,945,898	25	20.52	
b	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	kegiatan	5	871,312,500	871,312,500	1	15,799,250							1	15,799,250	20	1.81	
c	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan	kegiatan	2	57,716,000	27,716,000	1	4,181,898							1	4,181,898	50	15.09	

		Pembangunan Bidang Produksi Daerah																	
		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program														31.67			
		Predikat														Sangat Tinggi			
JUMLAH				1,106,744,500	976,744,500		35,927,046		0		0		0		35,927,046				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																31.67	3.68		
PREDIKAT																Sangat Tinggi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																100.00			
PREDIKAT																Telah Tercapai			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja		: Keterbatasan kompetensi aparatur																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan III dalam rangka tercapainya target kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya		: Direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																	

Bagian Pembangunan

Kode Rekening	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		
							I		II		III		IV						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A																			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH																		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang selesai tepat waktu	%	100			1.20								1.2		1.2		
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit kerja tepat waktu	%	100			100								100		100.0		
		Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	100			100								100		100.0		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaporan Pembangunan yang tepat waktu	Laporan	12	250,000,000	124,000,000	3	11,131,948							3	11,131,948	25.00	8.98	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	85,000,000	50,000,000	0	4,079,500.00							0	4,079,500	0.00	8.16	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	165,000,000	74,000,000	1	7,052,448.00							1	7,052,448	25.00	9.53	
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan								25.00		
									Predikat								Sangat Tinggi		
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Program								25.00		
									PREDIKAT								Sangat Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: kedisiplinan, koordinasi dan tanggung jawab																
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: fasilitas komputer kurang memadai dan kurangnya jumlah sumber daya manusia																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
	PROGRAM/	PROGRAM/ KEGIATAN					I		II		III		IV						
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
4.01.03.2.03	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah				1,300,000,000	252,068,400		28,524,520								28,524,520		11.32	
		Prosentase pengadaaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100			1.83								1.83		1.83		
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100			5.58								5.58		5.58		
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100			2.07								2.07		2.07		
401.20.001	Pelaksanaan ULP dan LPSE (Tahun 2019)	- Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu - Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu - Presentase penggunaan E	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		procurement terhadap belanja pengadaan																
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Tahun 2020-2023)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	109	425,000,000	125,179,200	8	18,801,624							8	18,801,624	7.34	15.02
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Tahun 2020-2023)	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	233	550,000,000	120,839,200	13	9,722,896							13	9,722,896	5.58	8.05
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Tahun 2020-2023)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	103	325,000,000	6,050,000	26	0							26	0	25.24	0.00
			JUMLAH		1,300,000,000	252,068,400		28,524,520		0		0		0		28,524,520		
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	12.72	11.32
																PREDIKAT	Rendah	
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH							3.16		
																PREDIKAT	Upaya Keras	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan															
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan I dalam rangka tercapainya target kinerja															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA															

Bagian Organisasi

KODE	BIDANG/	INDIKATO R KINERJA	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
	PROGRAM/	PROGRAM/ KEGIATAN					I		II		III		IV						
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
4.01.01	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusuna n LKjIP	%	74.50	140,000,00 0	140,000,000	100.00	7,807,346	0.0 0	0	0.0 0	0	0.0 0	0	100.00	7,807,346	100.0 0	5.5 8	
4.01.01.2 .13	Penataan Organisasi																		
4.01.01.2 .13.01	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen kelembagaa n dan analisis jabatan	Dokume n	2	50,000,000	30,000,000	0.50	1,609,000	0	0	0	0	0	0	0.50	1,609,000	25	5.3 6	
4.01.01.2 .13.02	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah kegiatan Bimtek Pelayanan Prima dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	kegiatan	2	40,000,000	80,000,000	0.50	5,948,346	0	0	0	0	0	0	0.50	5,948,346	25	7.4 4	
4.01.01.2 .13.03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah fasilitasi kegiatan PMPRB	kegiatan	2	15,000,000	10,000,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0	-	
4.01.01.2 .13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja Bupati	Dokume n	2	35,000,000	20,000,000	0.50	250,000	0	0	0	0	0	0	0.50	250,000	25	1.2 5	
			JUML AH		140,000,00 0	140,000,000		7,807,346		0		0		0		7,807,346			
							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH										19	5.5 8	
																PREDIKAT	Tinggi		

							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH										100.0	5.5	
																	0	8	
																	Telah Tercapai		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II dalam rangka tercapainya target kinerja																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																

Bagian Umum

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
							I		II		III		IV						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	16
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA			2,815	32,704,553,973	24,958,639,310	660	7,594,472,022	0	0	0	0	0		660	7,594,472,022	23.45	30.43	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,666	14,328,710,810	13,153,477,548	357	3,030,531,269							357	3,030,531,269	21.43	23.04	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	1666	14,328,710,810	13,153,477,548	357	3,030,531,269	0		0		0		357				
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			28	169,749,163	170,973,340	6	36.175.425	0	0	0	0	0	0	6	36.175.425	21.43	21.16	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	org/bln	28	169,749,163	170,973,340	6	36,175,425							6	36,175,425	21.43	21.16	
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1								21.43	22.10	
									Predikat						Sangat Tinggi				

B	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			587	340,000,000	340,000,000	159	2,263,882,664	-	-	-	-	-	-	159	2,263,882,664	27.09	665.85	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	stel	50	300,000,000	300,000,000	20	0							20				
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	3	40,000,000	40,000,000	1	0							1				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				108,273,500														
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	108,273,500	0	0	0							0	0	0.00	0.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			300	3,800,000,000	2,225,755,100	75	543,552,116							75	543,552,116	25.00	14.30	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	paket	12	150,000,000	149,944,000	3	8,984,340	0	0	0	0	0	0	3	8,984,340	25.00	5.99	

		Kantor yang Disediakan																	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	200,000,000	100,000,000	3	0						0	3	0	25.00	0.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	150,000,000	149,980,100	3	2,535,000							3	2,535,000	25.00	1.69	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	250,000,000	250,000,000	3	375,000							3	375,000	25.00	0.15	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	eks	228	50,000,000	49,920,000	57	5,152,500							57	5,152,500	25.00	10.32	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	2,000,000,000	1,025,911,000	3	457,751,000							3	457,751,000	25.00	44.62	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	laporan	12	1,000,000,000	500,000,000	3	68,754,276							3	68,754,276	98.00	13.75	

		Konsultasi SKPD																	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17	5,592,600,000	1,404,023,022	9	484,592,000							9	484,592,000	6.47	34.51	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	4,060,000,000	603,077,022	1	470,000,000	0	0	0	0	0	0	1	470,000,000	100	77.93	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	1,100,000,000	701,000,000	1	0	0						1	0	0.00	0.00	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	175,000,000	0									0	0	0.00	0.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	15	257,600,000	99,946,000	7	14,592,000	0				0		7	14,592,000	0.00	0.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	4,396,394,000	4,396,390,500	9	951,171,711	0	0	0	0	0	0	9	951,171,711	25	21.64	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	15,000,000	15,000,000	3	1,500,000							3	1,500,000	25.00	10.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	1,098,400,000	1,098,400,000	3	237,180,366							3	237,180,366	25.00	21.59	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	3,282,994,000	3,282,990,500	3	712,491,345							3	712,491,345	25.00	21.70	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145	2,332,826,500	1,632,021,800	36	175,556,837	0	0	0	0	0	0	36	175,556,837	24.828	10.76	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	28	250,000,000	249,995,000	7	48,014,389							7	48,014,389	25.00	19.21	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	unit	20	701,826,500	701,824,400	5	104,545,648							5	104,545,648	25.00	14.90	

	Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	12	80,000,000	59,986,000	3	0							3	0	25.00	0.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	120,000,000	99,999,000	3	1,669,500							3	1,669,500	25.00	1.67	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	1	20,000,000	19,900,000		0							0	0	85.00	0.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung /bulan	72	1,161,000,000	500,317,400	18	21,327,300							18	21,327,300	85.00	4.26	
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			36	1,636,000,000	1,635,998,000	9	109,010,000	0	0	0	0	0	0	9	109,010,000	25	6.66	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	354,000,000	353,998,000	3	50,000,000							3	50,000,000	95.20	14.12	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	paket	12	282,000,000	282,000,000	3	47,000,000							3	47,000,000	94.00	16.67	

		yang Disediakan																	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	12	1,000,000,000	1,000,000,000	3	12,010,000							3	12,010,000	1.89	1.20	
															58.00				
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	21.26	24.60	
																Predikat	Sangat Tinggi		
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	21.34	23.35	
																PREDIKAT	Sangat Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN TAHUN 2023				REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
							TW I		TW II						
				K	Renja	DPA	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	18	19	20	21	22
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani	%	100			100				100		100		
1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
c	Penyediaan Dana Penunjang Opsional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	192	600,000,000	600,000,000	35	53,900,000			35	53,900,000	18.23	8.98	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM													18.23		
PREDIKAT													Tinggi		
2	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan														
a	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	800	676,864,000	446,000,000	389	118,624,888			389	118,624,888	48.63	26.60	

b	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	2000	1,300,000,000	1,000,000,000	789	321,937,277			789	321,937,277	39.45	32.19	
c	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	800	600,864,000	346,000,000	251	63,776,524			251	63,776,524	31.38	18.43	
	Jumlah				3,177,728,000	2,392,000,000	1,429	558,238,689	-	-	1,429	558,238,689			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM													39.82		
PREDIKAT													Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM													29.02	23.34	
PREDIKAT													Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													34.42		
PREDIKAT													Sangat Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja															
Faktor penghambat pencapaian kinerja															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya															

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

- 1 Bagian Pemerintahan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
Penataan Administrasi Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

- 2 Bagian Kesra
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

- 3 Bagian Hukum
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

- 4 Bagian Perekonomian
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

- 5 Bagian Pembangunan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- 6 Bagian PBJ
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 7 Bagian Umum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

- 8 Bagian Organisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Penataan Organisasi
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- 9 Bagian Prokompim
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitas Keprotokolan
Fasilitas Komunikasi Pimpinan
Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

- 1 Bagian Perekonomian
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD belum memenuhi target

disebabkan Pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilakukan pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, hingga triwulan IV belum dapat diketahui opini audit laporan keuangan BUMD oleh Akuntan Publik.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan melakukan pembinaan terutama terhadap pencatatan dan administrasi laporan keuangan, Melakukan koordinasi secara berkala sehingga permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Memuaskan** yaitu dengan nilai **98,51%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- Indeks reformasi Birokrasi;

Capaian Kinerja : 98.33 %

Kategori : Sangat Memuaskan
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
- Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Capaian Kinerja : 97

Kategori : Sangat Memuaskan
- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Capaian Kinerja : 91.07

Kategori : Sangat Memuaskan

6. Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
7. Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
8. Cakupan Kecamatan Tertib Adminsitrasi
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
9. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
10. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
11. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
12. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
13. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
14. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
15. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi
 Capaian Kinerja : 100
 Kategori : Sangat Memuaskan
16. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
 Capaian Kinerja : 75
 Kategori : Sangat Memuaskan

17. Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
18. Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
19. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
20. Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
21. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
22. Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
23. Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
24. Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan
25. Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP

Capaian Kinerja : 100

Kategori : Sangat Memuaskan

26. Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah
Capaian Kinerja : 100
Kategori : Sangat Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun 2023
Kabupaten Temanggung

Bagian Pemerintahan

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023 (%)	STATUS		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	22	25	26	27
A	FUNGSI PENUNJANG : SEKRETARIAT DAERAH																			
	INDIKATOR SASARAN																			
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	angka	3,35	3,3	3,35	3,40	3,45	3,50	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	95,71		UK	Tertibnya Administrasi di Bagian Pemerintahan	Keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, capaian kinerja dari OPD belum maksimal. Penilaian dari Kemendagri terakhir keluar pada tahun 2018. Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 belum keluar, sehingga sampai saat ini data yang digunakan mengacu pada data tahun 2018.	Melakukan koordinasi dengan Bappeda, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
	INDIKATOR PROGRAM																			

1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	62,74	75	75	100	100	100	100	100	100	100	32.79	32.78688525		UK	Adanya kerjasama dari kabupaten yang lain yang berbatasan dalam kegiatan inventarisasi pilar batas	Keterbatasan anggaran yang tersedia dan lokasi yang sulit dijangkau	Melakukan koordinasi dengan Kabupaten lain yang berbatasan dalam kegiatan inventarisasi pilar batas sehingga target di TW 4 dapat tercapai	
			Jumlah Pilar Batas yang terinventarisir							4	51	61	61	61	20						
			Jumlah total Pilar batas sesuai Permendagri							4	51	61	61	61	61						
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	93,33	100	100	100	100	100	83.33	100.00	100	100.00	100.00	100	TT	Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM		Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM		
			Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu							5	6	6	6	7							
			Jumlah Perangkat Daerah Pengampu SPM							6	6	6	6	7							
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	95	100	100	100	100	100	90,00	95.00	100	100.00	100.00	100	TT	telah diamanahkan dalam PP no 17 Tahun 2018	Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari kecamatan dan kurangnya lengkapnya data yang dikirim			
			Jumlah Kecamatan tertib administrasi							18	19	20	20	20							
			Jumlah Keseluruhan kecamatan							20	20	20	20	20							
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1											95,71	0	1					
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			3											77.60	2	1					
JUMLAH IKPD			4											77.60	2	2					

Bagian Hukum

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI					Capaian s.d. 2023 (%)	STATUS		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23
BIDANG : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
INDIKATOR PROGRAM																				
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	%	33	30	30	30	30	30	28.57	16	27.27	60	60	100	TT		Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati	Seharusnya Perangkat Daerah pengusul Perda pro aktif dalam mengusulkan Perbup sesuai kebutuhan yang diamanatkan dalam Perda
			Jumlah Perda yang ditindaklanjuti dengan Perbup							4	4	3	9	9						
			Jumlah Perda							14	25	11	15	15						
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	68	20	100	100	100	100	86	59.78	82.22	100	21.43	21.43		UK	Komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan	Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasi	Seharusnya Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda dan Perbup harus tertib administrasi dengan secepatnya menyampaikan

																		an beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal	dokumen Perda dan Perbup yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk diinput di JDIH
			Jumlah Perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH						86	55	111	100	3						
			Jumlah perundangan yang dibuat						100	92	135	100	14						
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	83	100	100	90	90	90	100	100	100	100	100	100	TT	Terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar	Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum	Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat

			Permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi						29	23	26	36	6						
			Permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi						29	23	26	36	6						
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%	17	25	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	TT	Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum	Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum	Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan juga adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat
			Permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi						1	4	2	3	3						
			Permasalahan hukum yang masuk secara litigasi						1	4	2	3	3						
		Jumlah Indikator	4	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA BAGIAN										80.36	3	1			
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM										80.36	3	1			

Bagian Kesra

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2022 (%)	STATUS			CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			TT	AT		UK		TT					AT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	20	22	23	24	
BIDANG : Administrasi Pemerintahan dan kesra																											
1	Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	80	82	84	86	88	90	48.40	89.00	89.31	90.95	90.95	100.00				101.05	TT			jumlah rumah ibadah dan sarpras kondisi baik dibagi jumlah seluruh rumah ibadah dna sarpras pendidikan agama dikali 100	komitmen yang tinggi dari pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Adanya perubahan kebijakan	tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA	
Jumlah rumah ibadah kondisi baik										2985	5162	5180	5275	5275													
Jumlah rumah ibadah dan sarpras keagamaan										6167	5800	5800	5800	5800													
JUMLAH IKPD BAGIAN			1	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG											100.00	0	0	0	101.05	1	0	0					

Bagian Perekonomian

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023 (%)	STATUS		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23		
BIDANG : Fungsi penunjang lainnya bidang Administrasi Pemerintahan																						
		INDIKATOR PROGRAM																				
1	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%		100	100	100	100	100	95.95	85.52	100	100	100	100.00	TT		Ketersediaan barang bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan barang bersubsidi.	Ketersediaan pupuk yang dibatasi. Agen/pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok.	1.	Memberikan sosialisasi dan monitoring secara berkala kepada agen/pangkalan LPG dan BBM.	
					Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi							4	4	4							2.	Memberikan sosialisasi dan monitoring kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK.
					Jumlah kebutuhan barang bersubsidi							4	4	4								
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	TT		Permasalahan aduan barang bersubsidi dapat terselesaikan dengan koordinasi.	Aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti pendukung.	Menghimbau agar penyampaian aduan secara tertulis dan dilengkapi dokumen/bukti pendukung atau video.		
					Jumlah laporan permasalahan barang subsidi yang terselesaikan					5	4	7	7	1								
					Jumlah laporan permasalahan barang subsidi					5	4	7	7	1								
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%		100	100	50	66.67	80	66.67	50	50	50	80	100.00	TT		Pembinaan dan Evaluasi BUMD dilaksanakan secara rutin setiap triwulan. Koordinasi	Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran	1.	Melakukan pembinaan terutama terhadap pencatatan dan admnistrasi laporan keuangan.	

			<i>Jumlah BUMD dengan opini WTP</i>	4	3	3	3	5				dan komunikasi perihal perkembangan dengan BUMD terkait.	dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. Sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD.	2.	Melakukan koordinasi secara berkala sehingga permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi.
			<i>Jumlah BUMD</i>	6	6	6	6	6							
JUMLAH IKPD		3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH							100.00	3	0			

Bagian Pembangunan

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023 (%)	STATUS		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	26	27	28
	BIDANG: Fungsi Penunjang Lainnya Bidang Administrasi Pemerintahan																			
INDIKATOR PROGRAM																				
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1.20		UK	Penetapan Anggaran DAU baik yang ditentukan maupun yang tidak ditentukan sudah disosialisasikan	1. Mapping anggaran baik DAU (earmark) maupun DAK; 2. Menunggu terbitnya petunjuk operasional DAK; 3. Menunggu surat keputusan penetapan lokasi DAK; 4. Menunggu kesiapan aplikasi E-Purchasing baik penyedia maupun ketersediaan barang/jasa; dan	1. Kesiapan aplikasi E-Purchasing; 2. Surat Keputusan Penetapan Lokasi segera terbit; dan 3. Perencanaan segera tercukupi tepat waktu.
		Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan								650	396	329	419	5						
		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan								650	396	329	419	415						

																	5. Proses perencanaan yang membutuhkan waktu.			
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit kerja tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100	100.00	100	100.00	TT		1. Karena menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencaira GU 2. Tertib pelaporan administrasi dan keuangan	1. Kedisiplinan; 2. Ketidaktepatan data.	1. Tertib pelaporan; 2. Evaluasi pelaporan.
			Jumlah PD/unit kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu						104	104	103	103	103							
			Jumlah PD/unit kerja						104	104	103	103	103							
		Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%				90	92	95	96	97	96	99.37	104	100.00	TT		1. Koordinasi internal baik PPTK, PPK, KPa maupun PA 2. Koordinasi dengan OPD teknis terkait	1. Target terlalu rendah 2. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	1. Koordinasi internal dan eksternal; 2. Penetapan target yang realistis; 3. Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan.
			Jumlah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah						95.64	97.27	96.39	99.37	20.37							
			Jumlah target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah						100.00	100.00	100.00	100.00	19.66							
JML IKPD PROGRAM	3												RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM	67.07	2	1				
JUMLAH IKPD PD	3	RATA-RATA CAPAIAN PD											67.07	2	1					

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2023	STATUS			CAPAIAN s.d 2023 (%)	STATUS			Rumus IKPD	Penjelasan IKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi dan Tindak Lanjut		
					2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020		2020	2020	2020		2020	2020	2020						2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	20	21	22	23	24		
INDIKATOR SASARAN																													
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	angka	n.a	n.a	n.a	10	20	25	0	0	50	100	100	100.00	TT				100	TT				Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ ditambah Nilai Kemungkinan dibagi 2	1. Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 100, karena keterisian formasi JF PBJ 11 (sebelas) orang dari 11 (sebelas) orang kebutuhan JF PBJ. 2. Nilai Kematangan 100, telah terpenuhi 9 variabel dari 9 variabel di level 3 Proaktif.	- Formasi JF PBJ telah terpenuhi menjadi 11 (sebelas) orang. - Nilai Kematangan UKPBJ telah terpenuhi menjadi 9 (sembilan) variabel di level 3 Proaktif.		
INDIKATOR PROGRAM																													

1	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	1.83	0.02				UK	1.83			UK	Jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan akan dibagi jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP dikali 100	Jumlah keseluruhan paket pekerjaan di SIRUP sering berubah karena kewenangan Pengguna Anggaran	Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggran 2023	Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan	Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggran 2023
			jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan								153	56	130	129	2												
			jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP								153	56	130	129	109												
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%		-	-	100	100	100	33.89	30.07	100	100	5.58	0.06				UK	5.58			UK	Jumlah paket pengadaan barang/jasa lewat EPL yang berhasil dilaksanakan akan	Jumlah keseluruhan paket pekerjaan di SIRUP sering berubah karena kewenangan Pengguna Anggaran	Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan	Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing kepala OPD dalam pelaksanaan

[illegible]

			<i>Jumlah paket PL (non tender) dibawah 50 juta</i>																		
			0	0	29 40	20 64	38 67														
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	1	RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					100.00	1	0	0	100	1	0	0						
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	3	RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM					0.03	0	0	3	3.16	0	0	3						
	JUMLAH IKPD	4	RATA RATA CAPAIAN KINERJA BAGIAN					50.02	1	0	3	51.58	1	0	3						

Bagian Organisasi

N O	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	KON DISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAI AN s.d 2023 (%)	STATUS		RUMUS IKPD	PENJELA SAN IKPD	FAKTOR PENDORO NG	FAKTOR PENGHAM BAT	UPAYA PENCAPAI AN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					201 9	202 0	202 1	202 2	20 23	2019	2020	2021	2022	2023			TT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	BIDANG : Administrasi Pemerintahan																					
		INDIKATOR TUJUAN																				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	angka	72.34	62	64	64	64.5	65	62,76	62.70	63.42	64.61	64.61	99.40		UK	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih KKN dan kualitas pelayanan publik	Penilaian Tahun 2023 belum dilaksanakan sehingga masih menggunakan data Tahun 2022	Pelaksanaan RB yang dilakukan sesuai Road Map yang ditetapkan	Belum kuatnya komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi RB	Memberikan sosialisasi dan proses pendampingan dari Kemen PANRB, Internalisasi Budaya Kerja
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	75	84	85	80.5	81	82	79,95	80.41	82.06	83.41	83.41	100	TT	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat: nilai rata-rata dari hasil survey di perangkat daerah	Penyusunan laporan SKM Tahun 2023 belum dilaksanakan sehingga masih menggunakan data Tahun 2022	Penerapan pelayanan online, mempermudah akses, pemanfaatan teknologi informasi	SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik	Diklat/ BinteK pelayanan prima	
Rata Rata Capaian Tujuan															99.70	1	1					

		INDIKATOR SASARAN																			
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	nilai	CC	B	B	B	BB	BB	B	B	B	B	B	92.34	UK	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	Hasil Penilaian Tahun 2023 belum dilaksanakan sehingga masih menggunakan data Tahun 2022	Aplikasi yang sudah terintegrasi antara e-planing, e-budgeting, , menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB di tahun sebelumnya Adanya efisiensi dari sisi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab. Temanggung	Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
		INDIKATOR PROGRAM																			
3	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP	%	100	58.70	58.70	64.57	70.20	74.50	58.70	58.70	100	100	100	100	TT	Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat B dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100	LKjIP Tahun 2023 belum disusun, sehingga menggunakan capaian tahun 2021 (hasil evaluasi 2022 belum release)	Aplikasi yang sudah terintegrasi antara e-planing e-budgeting, dan e-monev, Reviu dari inspektora ditindaklanjuti oleh PD, Pendampingan yang intens dari Bagian Organisasi	Belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD, Renstra, PK dan SKP	perlu integrasi aplikasi antar e-planning, e-budgeting, dan e-monev yang disesuaikan dengan perubahan Permen 90 tahun 2019

			Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat B						27	27	46	46	46							
			Jumlah seluruh Perangkat Daerah						46	46	46	46	46							
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN											92.34	0	1				
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM											100.00	1	0				
	JUMLAH IKPD BAGIAN	2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA BAGIAN											96.17	1	1				

Bagian Umum

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2023 (%)	STATUS		CAPAIAN s.d 2023 (%)	STATUS		RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK		TT	UK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	24	25	26	27	28
	BIDANG : Fungsi Penunjang Kepala Daerah																								
		INDIKATOR PROGRAM																							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100				100	100	25	25	UK	25	UK		Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	Terpenuhi laporan keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Adanya target untuk membuat dokumen perencanaan, laporan keuangan, laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu	Adanya perubahan kebijakan dan aplikasi baru yang dinamis	meningkatkan kemampuan SDM serta meningkatkan koordinasi antar pelaksana kegiatan

		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100			100	100	27.1	27.09		UK	27.09		UK	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100%	Kebutuhan yang terpenuhi adalah tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana kedinasan Kepala Daerah	Adanya sarana prasarana kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah yang harus dipenuhi	Adanya perubahan agenda kegiatan/ acara pimpinan daerah dari rencana sebelumnya	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi realisasi kegiatan secara berkala agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai peraturan yang berlaku
			Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi									100	100	159											
			Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah									100	100	587	27.09			27.09							
JUMLAH INDIKATOR			2	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH											26.04	0	2	26.04	0	2					

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

N O	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SA TU AN	KON DISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023 (%)	STATUS		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	22	23	
		INDIKATOR PROGRAM																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani	%	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100.00	TT		terpenuhinya SDM bagian prokompim	Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar Agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak.	mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas
					Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani							12	12	6						
					Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang Terlayani							12	12	6						
JML INDIKATOR PROGRAM			1	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM											100.00	1	0			
JML IKPD			1	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN											100.00	1	0			

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 15 terdiri dari:
 - a. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM
 - 2) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM
 - b. Cakupan kecamatan tertib administrasi
 - 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah telah diamanahkan dalam PP no 17 Tahun 2018
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari kecamatan dan kurangnya lengkapnya data yang dikirim
 - c. Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
 - 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Seharusnya Perangkat Daerah pengusul Perda pro aktif dalam mengusulkan Perbup sesuai kebutuhan yang diamanatkan dalam Perda
 - d. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
 - 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya

kuantitas pegawai di Bagian Hukum

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat
- e. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan juga adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat
- f. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya perubahan kebijakan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA
- g. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Ketersediaan barang bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan barang bersubsidi.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Ketersediaan pupuk yang dibatasi, Agen/pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memberikan sosialisasi dan monitoring secara berkala kepada agen/pangkalan LPG dan BBM, Memberikan sosialisasi dan monitoring kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK.
- h. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Permasalahan aduan barang bersubsidi dapat terselesaikan dengan koordinasi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti pendukung.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menghimbau agar penyampaian aduan secara tertulis dan dilengkapi dokumen/bukti pendukung atau video.
- i. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Pembinaan dan Evaluasi BUMD dilaksanakan secara rutin setiap triwulan, koordinasi dan komunikasi perihal perkembangan dengan BUMD terkait.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. Sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pembinaan terutama terhadap pencatatan dan administrasi laporan keuangan, Melakukan koordinasi secara berkala sehingga permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi.
- j. Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit kerja tepat waktu
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Karena

menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencaira GU.
Tertib pelaporan administrasi dan keuangan

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kedisiplinan, Ketidaksesuaian data.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Tertib pelaporan, Evaluasi pelaporan
- k. Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi internal baik PPTK, PPK, KPA maupun PA, Koordinasi dengan OPD teknis terkait
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Target terlalu tendah, Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi internal dan eksternal, Penetapan target yang realistis, Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan.
- l. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Formasi JF PBJ telah terpenuhi menjadi 11 (sebelas) orang, Nilai Kematangan UKPBJ telah terpenuhi menjadi 9 (sembilan) variabel di level 3 Proaktif.
- m. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Penerapan pelayanan online, mempermudah akses, pemanfaatan teknologi informasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diklat/ BinteK pelayanan prima
- n. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Aplikasi yang sudah terintegrasi antara e planing e budgeting, dan e monev, Reviu dari inspektorat ditindaklanjuti oleh PD, Pendampingan yang intens dari Bagian Organisasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD,

Renstra, PK dan SKP

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu integrasi aplikasi antar e- planning, e- budgeting, dan e- monev yang disesuaikan dengan perubahan Permen 90 tahun 2019
- o. Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani
 - 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah terpenuhinya SDM bagian prokompim
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar Agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas
2. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 11 terdiri dari:
 - a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tertibnya Administrasi di Bagian Pemerintahan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, capaian kinerja dari OPD belum maksimal. Penilaian dari Kemendagri terakhir keluar pada tahun 2018. Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 belum keluar, sehingga sampai saat ini data yang digunakan mengacu pada data tahun 2018.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan Bappeda, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - b. Cakupan pilar batas yang terinventarisir
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kerjasama dari kabupaten yang lain yang berbatasan dalam kegiatan inventarisasi pilar batas
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan anggaran yang tersedia dan lokasi yang sulit dijangkau
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

Melakukan koordinasi dengan Kabupaten lain yang berbatasan dalam kegiatan inventarisasi pilar batas sehingga target di TW 4 dapat tercapai

- c. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Seharusnya Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda dan Perbup harus tertib administrasi dengan secepatnya menyampaikan dokumen Perda dan Perbup yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk diinput di JDIH
- d. Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selesai tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Penetapan Anggaran DAU baik yang ditentukan maupun yang tidak ditentukan sudah disosialisasikan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Mapping anggaran baik DAU (earmark) maupun DAK, Menunggu terbitnya petunjuk operasional DAK, Menunggu surat keputusan penetapan lokasi DAK, Menunggu kesiapan aplikasi E-Purchasing baik penyedia maupun ketersediaan barang/jasa, dan Proses perencanaan yang membutuhkan waktu.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah esiapan aplikasi E-Purchasing, Surat Keputusan Penetapan Lokasi segera terbit, dan Perencanaan segera tercukupi tepat waktu.
- e. Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Tahun Anggran 2023

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggran 2023
- f. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggran 2023
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggran 2023
- g. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/1919/050/01/XI/2021 tentang Pencatatan Non Transaksional pada SPSE versi. 4.4 Tgl. 15 November 2021
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/1919/050/01/XI/2021 tentang Pencatatan Non Transaksional pada SPSE versi. 4.4 Tgl. 15 November 2021

h. Indeks reformasi Birokrasi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sesuai Road Map yang ditetapkan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum kuatnya komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi RB
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memberikan sosialisasi dan proses pendampingan dari Kemen PANRB, Internalisasi Budaya Kerja

i. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Aplikasi yang sudah terintegrasi antara e- planing, e-budgeting., menindak lanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB di tahun sebelumnya Adanya efisiensi dari sisi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab. Temanggung
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

j. Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya target untuk membuat dokumen perencanaan, laporan keuangan, laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya perubahan kebijakan dan aplikasi baru yang dinamis
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan kemampuan SDM serta meningkatkan koordinasi antar pelaksana kegiatan

k. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya sarana prasarana kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah

yang harus dipenuhi

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya perubahan agenda kegiatan/acara pimpinan daerah dari rencana sebelumnya
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melaksanakan koordinasi dan evaluasi realisasi kegiatan secara berkala agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai peraturan yang berlaku

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Sekretariat Daerah terdiri dari 9 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bagian PBJ, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Humas, dan Bagian Umum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bagian Pemerintahan

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Peningkatan indeks EPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se wilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu; Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R), yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

No	Skor	Prestasi
1.	$3 < ST \leq 4$	Sangat Tinggi (ST)
2.	$2 < T \leq 3$	Tinggi (T)
3.	$1 < S \leq 2$	Sedang (S)
4.	$0 \leq R \leq 1$	Rendah (R)

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2023 Triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Triwulan I
1	Nilai	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453
2	Kategori	ST	ST	ST	ST	ST	ST
3	Kepmendagri	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
4	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 berada pada posisi nilai diatas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 masih menggunakan angka nilai di tahun 2018, karena sampai dengan saat ini meskipun proses evaluasi sudah selesai, namun belum ada nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses EPPD juga dibuktikan dengan data dukung. Data dukung dimaksud antara lain data tentang keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian, SOP, aset daerah. Data tersebut disajikan secara keseluruhan dengan penganggung jawab data adalah Perangkat Daerah Pengampu sesuai urusannya dan disajikan per urusan dengan merekapitulasi data dari masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Temanggung direkomendasikan sebagai berikut :

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Terhadap 4 (empat) IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

- a. Administrasi Umum

Terhadap 122 (seratus dua puluh dua) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang

- b. Capaian Kinerja

Terhadap 2 (dua) Urusan Wajib (Penanaman Modal dan Trantibum Linmas) dan 1 (satu) Urusan Pilihan (Pariwisata) dengan prestasi rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Temanggung direkomendasikan sebagai berikut :

1. Tataran pengambil kebijakan

Terhadap 4 (empat) IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang.

2. Tataran pelaksana kebijakan

- a. Administrasi Umum

Terhadap 122 (seratus dua puluh dua) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

- b. Capaian Kinerja

Terhadap 2 (dua) Urusan Wajib (Penanaman Modal dan Trantibum Linmas) dan 1 (satu) Urusan Pilihan (Pariwisata) dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang

Cakupan Pilar Batas yang Terinventarisir

Pilar Batas yang terinventarisir di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Triwulan I
1	Jumlah Pilar Batas yang Terinventarisir	32	51	61	61	61	20
2	Jumlah Pilar Batas	51	51	61	61	61	61
3	Persentase	62,74	100	100	100	100	30

Pilar batas ini ada empat (4) yaitu : PBU (Pilar Batas Utama), PABU (Pilar Acuan Batas Utama), PBA (Pilar Batas Antara) dan PABA (Pilar Acuan Batas Antara). Definisi pilar batas yang terinventarisir adalah pilar batas antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya yang sudah dilakukan pengecekan kondisi pilar batas di lokasi sesuai yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Inventarisir pada Tahun 2018 telah dilaksanakan untuk batas wilayah administratif antara Kabupaten Temanggung dan Kendal. Kabupaten Temanggung melaksanakan inventarisir wilayah tersebut karena batas dengan Kabupaten Kendal menjadi prioritas utama dalam pembahasan di tingkat provinsi atas dasar selisih batas pada wilayah tersebut. Hasil inventarisir tersebut tidak dapat dimasukkan dalam uraian tabel diatas karena Permendagri Batas Kabupaten Temanggung dan Kendal belum ditetapkan. Inventarisir pilar batas Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya telah dilakukan sejak Tahun 2018. Pada Tahun 2018 sampai Tahun 2021, inventarisasi pilar batas daerah cenderung meningkat dari 23,53% menjadi 62,74% kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2020. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan inventarisasi kembali di beberapa titik batas daerah

Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang serta dilakukan rapat penarikan garis kartometrik sepanjang batas. Masih perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi ke wilayah karena masih ada pilar batas dan lempeng yang bergeser/rusak. Proses inventarisir pilar antara lain:

- a. Menyiapkan Peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang berbatasan;
- c. Menentukan jadwal pelacakan di lapangan (lokasi);
- d. Membuat hasil laporan;
- e. Mensosialisasikan hasil laporan.

Realisasi data pilar perbatasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7

No	Tahun	Jumlah Pilar	Batas Kabupaten	Keterangan
1	Tahun 2023 TW I	10	Semarang	PABU 10, PBU 05, PABA 04, PBU 06, PBU 07, PBU 08, PABU 11, PBA 03, , PBA 04, PABU 12,
		10	Kendal	PABU 001, PABU 002, PABU 003, PABU 004, PABU 005, PABU 006, PABU 007, PABU 008, PABU 009 dan PABU 010

Dalam proses inventarisir pilar batas ini mengacu kepada pilar batas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan perangkat desa atau tokoh masyarakat dari desa yang berbatasan dan mengetahui posisi pemasangan pilar batas. Pada Tahun 2023 pelaksanaan pelacakan pilar batas di lokasi, Kabupaten Temanggung akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kerja sama Daerah eks Karisidenan Kedu Plus yang meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Semarang. Dalam hal ini adalah Tim Penegasan Batas Daerah yang sekretariatnya di Bagian Pemerintahan masing-masing Kabupaten.

Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu

Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Triwulan I
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM Tepat Waktu	14	5	6	7	7	7
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	15	6	6	7	7	7
3	Persentase	93,33	83,33	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 memiliki presentase yaitu 93,33% dan di Tahun 2019 mengalami penurunan 10% dari 93,33% menjadi 83,33%, hal ini terjadi karena SPM di Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa SPM yang urusannya dari 15 menjadi 6 urusan, maka target capaian berubah sesuai dengan target SPM pada Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Setda Temanggung. Untuk capaian Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I sudah tercapai 100%.

Perangkat Daerah pengampu SPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
5. Satpol PP dan Damkar;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
7. Dinas Sosial.

Semua Perangkat Daerah Pengampu SPM Kabupaten Temanggung tersebut telah melaporkan SPM tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu.

Cakupan Kecamatan tertib administrasi

Pelaporan kegiatan kecamatan dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui website “Laporan Kegiatan Kecamatan” diakses melalui tautan <http://pemerintahan.temanggungkab.go.id/lkk/>.

Pelaporan diinput setiap hari dan akan direkap dan dilaporkan maksimal pada tanggal 5 pada bulan berikutnya. Website LKK selanjutnya akan diintegrasikan dengan *Dashoard Eksekutif* yang dapat dimonitor oleh:

- a. Bupati Temanggung
- b. Wakil Bupati Temanggung
- c. Sekretaris Daerah
- d. Asisten Pemerintahan dan Kesra
- e. Bagian Pemerintahan sebagai pengelola

Uraian Kegiatan Camat yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi kecamatan;
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
5. Kegiatan tematik;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
7. Pelaksanaan tugas lain.

Jumlah Kecamatan yang tertib administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2023 Triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.9

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Triwulan I
1	Jumlah Kecamatan yang Tertib Administrasi	19	18	19	20	20	20
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	95	90	95	95	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Kecamatan yang Tertib Administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah 95% dan menurun pada tahun 2019, sampai Triwulan I Tahun 2023 yaitu 100%.

Untuk target tahun 2023 dalam RPJMD Kabupaten Temanggung, persentase Kecamatan yang tertib administrasi adalah sebesar 100%. Realisasi Triwulan I Tahun 2023 telah mencapai 100%. Seluruh Kecamatan di Kabupaten Temanggung telah mengumpulkan laporan bulanan secara lengkap melalui website “Laporan Kegiatan Kecamatan”. Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan serta kurang lengkapnya data menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelaporan. Adanya amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta adanya website Laporan Kegiatan Kecamatan sehingga dapat mengefisiensi dalam melaporkan

2. **Data Pokok Bagian Hukum**
- Persentase Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Dengan Peraturan Bupati**
- Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah diundangkan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
- Realisasi persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Jumlah Perda yang ditindaklanjuti Perbup	4	4	4	3	9	9
2.	Jumlah Perda	12	14	25	11	15	15
3.	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	33,3%	28,6%	16%	27,27%	60%	60%

Keterangan: * Menggunakan data tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan I menggunakan data tahun 2022 yaitu sebesar 60%. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan Triwulan I tahun 2023 peraturan daerah masih dalam bentuk rancangan dan belum ada yang ditetapkan dan diundangkan, sehingga belum ada peraturan bupati yang menindaklanjuti peraturan daerah. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi antara Bagian Hukum dengan OPD penyusun Peraturan Daerah terkait jalannya penyusunan Peraturan Daerah.

Berikut ini adalah daftar Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I.

Tabel 2.11

No	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati yang Menindaklanjuti Peraturan Daerah
1	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Peraturan Bupati Temanggung tentang Standar Operasional Pelayanan Penatalaksanaan Penyediaan Rehabilitasi Medis, Pemberian Rekomendasi dan Fasilitasi Akses Rehabilitasi Sosial dan Penyediaan Layanan Reintegrasi Sosial
2	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung	

3	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana	
4	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
5	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	- Peraturan Bupati Temanggung tentang Satuan Tugas Pekerja Migran Indonesia - Peraturan Bupati Temanggung tentang Pelatihan Swadana pada UPT BLK
6	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	
7	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Bupati Temanggung tentang Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2023
8	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
9	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
10	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	
11	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung	
12	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung	
13	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan	Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

	Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	
14	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peraturan Bupati Temanggung tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
15	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023	- Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Persentase Dokumentasi Perundangan Melalui JDIH

Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Adapun dokumentasi perundangan melalui JDIH merupakan peraturan perundang-undangan yang telah di dokumentasi melalui aplikasi JDIH, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Realisasi dokumentasi Perundangan melalui JDIH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2023 s.d Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12

No	Capaian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH	68	86	55	111	100	3
2	Jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	70	100	92	135	100	14
3	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	97,14%	86%	59,78%	82,2%	100%	21,42%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 sampai dengan triwulan I peraturan daerah maupun peraturan bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan belum semuanya terdokumentasi dalam JDIH Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu sarana dan prasarana seperti scanner belum memadai, kurangnya SDM pada Bagian Hukum, serta beberapa OPD pengusul belum mengirimkan file Perbup yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum.

Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi antara Bagian Hukum dengan OPD yang mengusulkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar kedepannya dokumen Perda ataupun Perbup yang sudah diundangkan dapat segera diinput di JDIH.

Berikut ini adalah daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH pada Tahun 2023 Triwulan I:

Tabel 2.13

No.	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati
1		Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
2		Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
3		Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Persentase Permasalahan Hukum yang Diselesaikan Secara Non Litigasi

Permasalahan hukum adalah pengesahan suatu kasus adanya kekosongan hukum yaitu adanya kebutuhan hukum masyarakat yang belum atau tidak tertampung dalam peraturan perundang-undangan atau hukum baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau hukum adat atau kebiasaan.

Non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar Pengadilan. Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.14

No	Capaian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi	34	29	23	26	36	6
2	Jumlah total permasalahan	16	29	23	26	36	6
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penanganan perkara secara non litigasi baru dapat tertangani mulai tahun 2017 dikarenakan baru teranggarkan setelah banyak munculnya permasalahan yang dapat diselesaikan secara mediasi di luar pengadilan. Beberapa perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dibahas bersama dengan unsur dinas terkait, pihak berperkara dan anggota Forkopimda Kabupaten Temanggung dengan dilakukan secara mediasi sehingga tidak perlu diproses sampai dengan persidangan.

Tabel 2.15

No.	Nama Permasalahan	Keterangan
1.	Permasalahan anggota BPD Kebondalem yang sudah tidak berdomisili di wilayah pemilihan	Triwulan I
2.	Permasalahan pendaftaran pencatatan Serikat Pekerja	
3.	Permasalahan pemanfaatan aset desa Candirotto berupa BGS/BSG	
4.	Permasalahan pemeriksaan pemilihan direktur BUMD di Kabupaten Temanggung	

5.	Permasalahan aliansi warga menggugat KPU Temanggung	
6.	Permasalahan pemilihan panitia pengawas Bawaslu	

Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Secara Litigasi

Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.16

No	Capaian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Permasalahan perkara yang diselesaikan secara litigasi	2	1	4	2	3	3
2	Jumlah total permasalahan	3	1	4	2	3	3
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	66,66%	100%	100%	100%	100%	100%

Permasalahan dan perkara baik pidana maupun perdata yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi di luar persidangan harus ditempuh melalui persidangan. Demi efektif dan efisiennya penanganan perkara, Bagian Hukum melalui Sub bagian Bantuan Hukum menangani perkara-perkara yang muncul tanpa melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Tabel 2.17

No.	Nama Permasalahan	Tergugat	Keterangan
1.	Gugatan PMH atas Lelang/tender pengadaan pupuk tahun anggaran 2018	Pokja ULP Kabupaten Temanggung	Kasasi
2.	Gugatan Tata Usaha Negara tentang Pertanahan	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Banding

3.	Gugatan Tata Usaha Negara terkait Keputusan Bupati Temanggung tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kades Kebondalem	Bupati Temanggung	Proses Persidangan
----	--	-------------------	--------------------

3. **Data Pokok Bagian Kesra dan Bina Mental**

Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik

Sarpras pendidikan keagamaan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan perananan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan).

Batasan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik yaitu:

- a. Keadaan fisik; terdapat ruang untuk perpustakaan tempat kitab suci dan buku keagamaan, terdapat ruang untuk bersuci, tempat parkir jamaah/ tempat alas kaki dan lain-lain.
- b. Sarana prasarana ; terdapat buku/kitab suci, tempat duduk (kursi atau alas lantai) semuanya tertata rapi bersih.
- c. Organisasi Kepengurusan.

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	3569	3615	3641	3659	3744	3744
	- Islam	3346	3395	3445	3463	3548	3548
	- Kristen	80	80	83	83	83	83

	- Katholik	18	18	16	16	16	16
	- Hindu	-	-	14	14	14	14
	- Budha	85	85	81	81	81	81
	- Konghuchu	-	-	2	2	2	2
5.	Jumlah sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	1529	1546	1521	1521	1531	1531
	- Islam	1708	1708	1517	1517	1527	1527
	- Kristen	57	57	-	-	-	-
	- Katholik	2	2	2	2	2	2
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	5054	5103	5162	5180	5275	5275
4	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan	5356	5360	5800	5800	5800	5800
5	Persentase Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	94	95,21	89	89,31	90,95	90,95

4. **Data Pokok Bagian Perekonomian**

Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi

Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pupuk						

	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi (ton)	47.600	42.878	34.367,632	114.200	111.701	4.590.951,34
	- UREA	21.500	18.961	15.685,182	38.293	25.049	2.581.786,64
	- NPK	3.100	6.040	6.606,670	14.111	36.983	2.009.164,70
	Jumlah Kebutuhan Barang bersubsidi (ton)	47.600	44.131	36.992	114.200	111.701	7.684.000
	- UREA	21.500	18.976	16.000	38.293	25.049	4.049.000
	- NPK	3.100	6.050	7.575	14.111	36.983	3.635.000
	Persentase (%)	100%	100%	100%	92,90%	100%	59,75%
2	LPG 3 kg (MT)						
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	20.742	21.813	23.968	25.861	27.026	27.046
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	20.350	21.468	21.813	25.861	27.026	27.046
	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pertalite (KL)						
	Jumlah Barang bersubsidi yang tersedia		10.290	7.032	360	84.561	89.890
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi		12.277	12.277	360	84.561	89.890
	Persentase (%)		83,8%	57,27%	100%	100%	100%
No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	Solar (KL)						
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	26.928	29.784	25.872	31.244	30.904	24.930
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	26.002	24.132	28.145	31.244	30.904	24.930
	Persentase (%)	100%	100%	91,92 %	100%	100%	100%
Rata Rata Persentase			95,95%	85,52%	100%	95.83%	89,94%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase ketersediaan produk barang bersubsidi tahun 2023 triwulan I tercapai rata-rata 89,94% yang terdiri dari capaian pupuk sebesar 59,75%, LPG sebesar 100%, pertalite sebesar 100% dan solar sebesar 100%.

Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi

Definisi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah presentase aduan/pelaporan masalah produk barang bersubsidi yang tertangani dari proses distribusi barang/jasa bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat.

Rumus perhitungan dari persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan dibagi laporan permasalahan barang subsidi. Realisasi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20

No.	Kegiatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	5	5	4	7	3	1
2	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi	5	5	4	7	1	1
	Prosentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi	100%	100%	100%	100%	300%	100%

Adapun laporan atau aduan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah terdapat aduan secara lisan dari para pengemudi angkudes melalui DPC Organda Kabupaten Temanggung, bahwa masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung. Antrian yang panjang tentunya akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan kepada pengguna angkutan umum sehingga pendapatan para pengemudi angkudes

menurun. Disarankan untuk membuat antrian khusus untuk pengisian bbm angkudes pada jam tertentu.

Persentase BUMD dengan opini WTP atas Pemeriksaan KAP

Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Pengertian KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya, jasa itu misalnya jasa pemeliharaan, manajemen akuntansi, perpajakan dan pembukuan.

Opini WTP merupakan pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK).

Definisi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD di Kabupaten Temanggung yang laporan keuanganya dengan opini WTP atas hasil audit KAP.

Rumus perhitungan dari persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi dengan jumlah BUMD. Perhitungan rumus ini dengan data kinerja Laporan Keuangan BUMD tahun sebelumnya yang diaudit KAP (*n-1*). Sehingga untuk pelaporan tahun 2023 adalah atas hasil audit KAP atas laporan keuangan BUMD tahun 2022.

Realisasi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah BUMD dengan Opini WTP	5	4	3	3	3	5

2	Jumlah BUMD	6	6	6	6	6	6
3	% BUMD dengan opini WTP	83,33%	66,67%	50%	50%	50%	83,33%

Dari tabel diatas, BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2022 sebanyak 5 (lima) BUMD, sedangkan 1 (satu) BUMD mendapatkan opini Tidak Wajar. Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2023 atas presentase BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik telah tercapai 100% dari target yang ditentukan yaitu 80%. Selengkapnya untuk perkembangan opini Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan BUMD sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.22

No.	Nama BUMD	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perumda Tirta Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Perumda Apotik Waringin Mulyo	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3.	Perumda Aneka Usaha	WDP	WDP	WDP	WDP	TW	TW
4.	Perumda BPR Bapas Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Perumda Bhumi Phala Wisata	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
6.	PT BPR BKK (Perseroda)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Jumlah BUMD dengan Opini WTP		5	5	4	3	3	5
Jumlah BUMD Kabupaten Temanggung		6	6	6	6	6	6
Persentase BUMD dengan Opini WTP		83,33%	83,33%	66,67%	50%	50%	83,33%

5. **Data Pokok Bagian Pembangunan**

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan	765	650	396	329	419	5
2	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan	765	650	396	329	419	415
3	Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu	100	100	100	100	100	1,20

Pencapaian persentase dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai 100%. Pada tahun 2023 pencapaian persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sampai dengan Triwulan I sebesar 1,20% atau sejumlah 5 paket yang sudah diselesaikan tepat waktu oleh penyedia dari 415 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Kekurangan dari target RPJMD pada indikator program ini sebesar 98,80% atau sebesar 410 paket belum selesai dilaksanakan. Berikut data dukung pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu di Triwulan I:

Tabel 2.24

NO	OPD	KEGIATAN	JANGKA WAKTU	METODE	JENIS	NILAI KONTRAK
1	DINBUDPAR	Pagelaran seni dalam rangka peresmian Gedung Sasana Budaya Bhumi Phala	25 Feb s/d 27 Feb 23	PL	Jasa	74,389,425
2	SATPOL PP & DAMKAR	Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang	24 Feb s/d 5 Mar 23	E.Purch	Brg	487,000,000

3	SATPOL PP & DAMKAR	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor - perlengkapan kantor	28 Feb s/d 3 mar 23	E.Purch	Brg	93,890,000
4	BAGIAN UMUM	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor perorangan	27 Feb s/d 15 Mar 23	E.Purch	Brg	470,000,000
5	DINKOPDAG	Belanja modal personal computer	6 s/d 24 Mar 23	E.Purch	Brg	76,650,000

Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu

Realisasi persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PD/unit kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu	104	104	104	103	103	103
2	Jumlah PD/unit kerja	104	104	104	103	103	103
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selesai tepat waktu melalui aplikasi Simpelbangda dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tetap yaitu sebesar 100%. Capaian ini masuk kriteria sangat tinggi dan dalam meningkatkan capaian hasil kinerja telah tercapai.

Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah

Realisasi persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah	99,13	95,64	97,27	96,39	99,37	20,37
2	Jumlah target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah	100	100	100	100	100	19,66
3	Persentase	99	96	97	96	99	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi fisik capaian Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif dan persentase target fisik capaian Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2023 tetap sebesar 100%. Capaian ini masuk ke kriteria sangat tinggi dan dalam meningkatkan capaian hasil kinerja telah tercapai. Berikut data dukung Capaian Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 di Triwulan I:

Tabel 2.27

Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah SP2D (Rp.)	Realisasi SPJ		Fisik		
		(Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
2.055.593.305.337	158.293.880.969	235.452.438.055	13,60	19,66	20,37	0,71

6. **Data Pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)

Pengukuran Indikator Sasaran yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

a. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) berdasarkan persentase keterisian formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung, dikelompokkan dengan penilaian yaitu :

- 1) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ > 90% dari formasi JF PPBJ, Nilai 100;
- 2) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 70% s.d < 90% dari formasi JF PPBJ, Nilai 80;
- 3) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 50% s.d < 70% dari formasi JF PPBJ, Nilai 60;
- 4) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 30% s.d < 50% dari formasi JF PPBJ, Nilai 40;
- 5) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 15% s.d < 30% dari formasi JF PPBJ, Nilai 20;
- 6) K/L/PD belum memenuhi kebutuhan JF PPBJ < 15% dari formasi JF PPBJ, Nilai 0;

Kebutuhan JF PPBJ di Kabupaten Temanggung adalah 11 (sebelas) orang dan keterisian formasi sudah terpenuhi berjumlah 11 (sebelas) orang JF PPBJ sehingga mendapatkan nilai 100.

b. Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi. Yang didetailkan kedalam 9 variabel yaitu Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi.

Tingkat kematangan sendiri terdiri atas 5 level yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Pencapaian target minimal level 3 (proaktif) adalah kondisi UKPBJ yang sudah sesuai dengan amanat peraturan-perundangan-undangan dan

kriteria pusat keunggulan yang diakui oleh LKPP sebagai Capaian Nilai Kematangan.

- 1) UKPBJ sudah mencapai 9/9 level proaktif, Nilai 100;
- 2) UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif, Nilai 80;
- 3) UKPBJ sudah mencapai 7/9 level proaktif, Nilai 60;
- 4) UKPBJ sudah mencapai 6/9 level proaktif, Nilai 40;
- 5) UKPBJ sudah mencapai 5/9 level proaktif, Nilai 20;
- 6) UKPBJ < 5/9 level proaktif, Nilai 0;

Berikut adalah capaian Indeks Tata Kelola PBJ Triwulan I tahun 2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100
2.	Nilai Kematangan	n.a	n.a	n.a	n.a	0	100	100
3.	Indeks Tata Kelola PBJ	n.a	n.a	n.a	n.a	50	100	100

Untuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sampai tanggal 31 Maret 2023 Triwulan I tahun 2023 telah memenuhi 9 dari 9 level proaktif. Oleh karena hal tersebut, nilai Indeks Tata Kelola PBJ menjadi 100.

Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan

Percepatan penyelenggaraan proses pemilihan penyedia barang/jasa telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 tahun 2019 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Permasalahan yang kerap timbul dalam implementasi ketentuan tersebut di atas adalah inkonsistensi rencana waktu pelaksanaan dengan realisasinya. Ketidak konsistenan para pelaku pengadaan barang/jasa terhadap waktu atas proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat berdampak pada pengurangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat mengantisipasi atas kejadian terhadap pemilihan ulang. Keterbatasan jumlah personil pengadaan barang/jasa yang melaksanakan keseluruhan paket pekerjaan melalui tender

dibanding jumlah keseluruhan paket tender yang ada di SIRUP. Dampak akhirnya adalah tidak selesainya atau tidak tepat waktunya penyelesaian pekerjaan sehingga juga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran satuan kerja.

Definisi dari Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan adalah Tingkat keberhasilan jumlah paket pekerjaan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP.

Rumus penghitungan dari Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan adalah jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibagi jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP dikali 100%.

Berikut adalah capaian pada tanggal 31 Maret 2023 Triwulan I tahun 2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan	-	-	153 Paket	56 Paket	130 Paket	129 Paket	2 Paket
2.	jumlah keseluruhan paket yang dimohonkan	-	-	153 Paket	56 Paket	130 Paket	129 Paket	109 Paket
3.	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	-	-	100 %	100 %	100%	100%	1.83%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dibentuklah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Temanggung di tahun 2019.

Di tahun 2015 s.d tahun 2018 masih berada di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung namun indikator kerja yang dilaksanakan berbeda dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Pengadaan barang/jasa pada tahun 2023 sudah terdapat 109 (seratus sembilan) paket tender yang berhasil dilaksanakan, namun hal ini juga tidak terlepas adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses tender yaitu diantaranya adalah :

- a. Adanya perubahan-perubahan dalam pembiayaan spesifikasi teknis, HPS dan perubahan waktu pelaksanaan.
- b. Hambatan lain berkaitan hal tersebut juga dikarenakan hal administratif seperti penandatanganan surat persetujuan karena faktor kedinasan yang mengharuskan KPA berada di luar kantor pada waktu yang bersamaan.
- c. Beban tugas rangkap dari PPK yang menyebabkan usulan proses pemilihan terlambat dari jadwal yang ditentukan.
- d. Beberapa satuan kerja yang menerapkan pola kejar tayang proses pemilihan penyedia barang/jasa di pertengahan sampai penghujung tahun anggaran, sehingga dengan adanya pola ini target percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pencapaiannya rendah.

Pencapaian indikator keberhasilan paket yang berhasil ditenderkan telah ditargetkan sejak awal oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda dengan mempercepat semua usulan yang sudah masuk untuk segera diproses. Untuk tahun anggaran 2023 paket pekerjaan yang ditargetkan 109 (seratus sembilan) paket pekerjaan, sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 paket pekerjaan melalui tender yang sudah selesai sejumlah 2 (dua) paket.

Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan

E-procurement merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Sebelum adanya penerapan *e-procurement* dalam dunia pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu langsung mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pengadaannya yang dapat memunculkan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Terbentuknya sistem *e-procurement* telah mentransformasi proses pengadaan menjadi lebih baik. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan sistem *e-procurement* direkapitulasi dalam

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Versi 2.3 melalui **<https://sirup.lkpp.go.id/sirup>** yang pengelola atau super adminnya terdapat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan angka nilai kontrak diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri telah berkembang menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *e-tendering*, yaitu tata cara atau metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan kemudian Penyedia dapat menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;
2. *e-catalogue* atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa pemerintah. Sedangkan prosesnya lebih dikenal dengan *e-purchasing* yaitu tata

cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.

Penerapan *e-procurement* perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Secara umum tahapan pelaksanaan *e-procurement* dibagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu: Penayangan Informasi, terdiri dari informasi umum dan informasi paket pekerjaan;

1. Proses CTI (*Copy To Internet*), yaitu penerapan *e-Procurement* melalui penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang/jasa;
2. Pelaksanaan semi *e-procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang;
3. Pelaksanaan *full e-procurement* yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet, namun dalam pelaksanaannya *full e-procurement* belum dapat dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan, rumus penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan di tahun 2023 ini ada perubahan karena ditahun sebelumnya rumus dalam perhitungannya dari jumlah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan lewat *e-procurement* dibagi dengan jumlah total pengadaan barang/jasa di Kabupaten Temanggung dikali 100%, namun hal tersebut terdapat ketidaksesuaian hasil yang disebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ada di SIRUP tidak semua melalui SPSE. Dari hal tersebut rumus penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang/jasa disesuaikan dan dilihat dari Jumlah pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan lewat e-pengadaan langsung (e-PL) dibagi dengan Jumlah keseluruhan paket e-pengadaan langsung (e-PL) diatas 50 juta yang ada di SIRUP Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2.30

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan melalui <i>e-procurement</i>	-	-	484 Paket	356 Paket	243 Paket	142 Paket	13 Paket
2.	Jumlah keseluruhan pengadaan barang/jasa diatas 50 juta yang ada di SIRUP	-	-	1428 Paket	1184 Paket	243 Paket	142 Paket	233 Paket
3.	Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang/jasa	-	-	33.89%	30.07%	100%	100%	5.58 %

Kendala dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi yaitu tidak semua SDM menguasai aplikasi *e-procurement*, sistem *e-procurement* masih sering terjadi *error system* dan kendali sistem ada di LKPP sehingga banyak tahapan ini dilakukan dengan metode manual dan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak jadi dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk pencapaian angka indikator yang baik didukung dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) maupun Perangkat Daerah.

Di tahun 2020 dan 2021 realisasi pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* mengalami penurunan drastis, adapun faktor penghambatnya adalah rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 sehingga banyak pembatalan paket tender yang sudah diajukan proses tender.

Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pencatatan Non-Tender yaitu pencatatan terhadap pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 yang diinput dan dicatatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui proses pencatatan pada SPSE dan pencatatan secara langsung pada sistem e-Katalog LKPP pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Di tahun 2021, Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan indikator baru. Di tahun 2022, guna meningkatkan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah mengutamakan belanja pengadaan barang/jasa kepada pedagang/*merchant* yang bergabung dengan penyelenggara perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan sehingga dalam pelaksanaan pencatatan non-tender juga termasuk dicatatkan rekap transaksi pengadaan barang/jasa dari Perangkat Daerah melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan. Pencatatan Non-Tender dapat dilaksanakan dengan menerapkan beberapa faktor yaitu :

- 1. Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada aplikasi SPSE versi 4.5 dan e-Katalog LKPP diakses melalui Monev E-Katalog LKPP <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id/public/dashboards>;
- 2. Dalam pelaksanaan pencatatan non-tender pada aplikasi SPSE versi 4.5 perlu kedisiplinan pelaporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk mencatatkan pengadaan barang/jasa non-tender dibawah Rp. 50.000.000,00.

Rumus dalam perhitungan Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dicatatkan pada LPSE dan e-Katalog LKPP dibagi jumlah paket Non-Tender dibawah Rp. 50.000.000,00 dikali 100%.

Tabel 2.31

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah paket Pengadaan Langsung (non-tender) yang dicatatkan pada LPSE dan e-Katalog LKPP	-	-	-	-	533 Paket	1992 Paket	80 Paket
2.	Jumlah paket Pengadaan Langsung (non-tender) dibawah Rp. 50.000.000,00	-	-	-	-	2940 Paket	2064 Paket	3867 Paket
3.	Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas	-	-	-	-	18,13 %	96.51 %	2.07%

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah paket Pengadaan Langsung (non-tender) yang dicatatkan pada LPSE dan e-Katalog LKPP	-	-	-	-	533 Paket	1992 Paket	80 Paket
	pelaksanaan pengadaan barang/jasa							

Dari tabel di atas dapat dilihat, pelaksanaan di Triwulan I tahun 2023 Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa masih dalam tahap penyesuaian oleh PPK. Untuk pencapaian angka indikator yang baik harus didukung kedisiplinan yang tegas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Perangkat Daerah dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

7. **Data Pokok Bagian Organisasi**

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memperbaiki area ataupun wilayah-wilyah birokrasi yang biasanya disebut 8 (delapan) area perubahan antara lain:

- a. Manajemen Perubahan Fokus pada *mind set* dan *culture set* untuk menuju Birokrasi yang berintegritas dan kinerja tinggi.
- b. Penataan Organisasi membentuk organisasi yang *rightsizing* tepat fungsi dan tepat ukuran.
- c. Penataan Tatalaksana Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas
- d. Penataan Peraturan PerUndang-Undangan, penyusunan regulasi yang tertib dan tidak tumpang tindih.
- e. Penataan SDM Aparatur, membangun SDM yang

- berintegritas, professional dan berkinerja.
- f. Penguatan Pengawasan, meingkatnya penyelenggaraan pemerintah bebas KKN.
 - g. Meningkatnya Akuntabilitas, Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
 - h. Pelayanan Publik, meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, rumus penghitungan dari indeks Reformasi Birokrasi adalah penggabungan penilaian dari total proses 60 % (indikator 8 area perubahan) dan total hasil 40 % (kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik). Untuk komponen penilaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Komponen Pengungkit (60%):

Tabel 2.32

No	Unsur	Bobot
1	Manajemen Perubahan	5 %
2	Penataan Tatalaksana	5 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

Komponen Hasil (40%):

Tabel 2.33

No	Unsur	Bobot
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20 %
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20 %

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	61,28
2	2019	62,76
3	2020	62,70
4	2021	63,42
5	2022	64,61
6	2023	*64,61

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2022 karena penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB belum dilaksanakan dan hasilnya akan diketahui pada bulan Maret tahun 2024. Berikut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB tahun 2022:

Tabel 2.35

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,72	13,45
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,49	6,47
	III. Reform	30,00	13,61	14,40
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,82	34,32
B	Komponen Hasil			

1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,35	7,53
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,21	8,30
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,59	8,12
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,45	6,34
	Total Komponen Hasil	40,00	31,60	30,29
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	63,42	64,61

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit .

Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang ditetapkan, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum kuatnya komitmen dari pimpinan dalam rangka perbaikan di seluruh area yang ditetapkan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung
Tahun 2018 – 2023

Tabel 2.37

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	75,38
2	2019	79,95
3	2020	80,41
4	2021	82,06
5	2022	83,41
6	2023	*83,41

Sumber: Bagian Organisasi, 2023

Keterangan: * Menggunakan data tahun 2022

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2022 karena nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 masih dalam tahap pelaksanaan survey dan hasilnya akan diketahui pada bulan Oktober tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IKM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah **83,41** dengan predikat **B (Baik)**. Faktor yang mendorong capain nilai diatas adalah Penerapan pelayanan online, mempermudah

akses, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarpras yang mendukung pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi serta peningkatan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Nilai SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.39

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2018	59, 05	CC
2	2019	60,16	B
3	2020	62,11	B
4	2021	63,84	B
5	2022	64,73	B
6	2023	*64,73	B

Keterangan: * Menggunakan data tahun 2022

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2022 karena hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 belum dilaksanakan, akan tetapi untuk bukti dukung sudah di unggah melalui aplikasi e-SAKIP Reviu Kementerian PANRB. Berikut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022: Tabel 2.40

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,33
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,90
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,73

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2023

Hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilainnya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pmda maupun level organisasi perangkat daerah.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung

Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP

Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam pembuatan LKJiP adalah penilaian terhadap beberapa indikator akuntabilitas kinerja dalam suatu Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan berdasarkan pada peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai B dalam penilaian SAKIP memiliki makna bahwa akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan di masa datang.

Untuk evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

Rumus penghitungan dari persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP adalah jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai B keatas dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat

akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 2.41

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Realisasi persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP dari tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42

No	Uraian	Tahun (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	27,65	58,70	58,70	100	*100	*100

Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 sudah tercapai 100%, Sedangkan untuk Tahun 2022 hasil evaluasi LKjIP Perangkat Daerah belum *release*. Berikut nilai LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2021:

Faktor pendorong untuk capaian nilai LKjIP diatas adalah adanya perubahan renstra untuk menghubungkan atau membuat linier antara RPJMD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) semua pegawai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum semua pejabat yang

membidangi perencanaan memahami linieritas perencanaan karena banyak pejabat yang baru.

8. **Data Pokok Bagian Umum**

Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dapat dihitung dari terpenuhinya laporan Perencanaan, laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, laporan keuangan, dan administrasi lainnya. Adapun rumus Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah adalah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100.

Tabel 2.43

No	Uraian	2023
1	Jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi	25
2	Jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	100
3	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	25

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada Triwulan I Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah telah tercapai 25 %. Dikarenakan indikator tersebut merupakan kegiatan rutin, maka realisasi akan tercapai setelah Triwulan IV.

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Rumus Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah yaitu jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung dari tahun 2023 Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.44

No	Uraian	2022
1	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi	159
2	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	587
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	27,09

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah pada Triwulan IV direalisasikan pada Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah yang sudah dilakukan diantaranya pada kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada kegiatan ini, bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mengampu 2 (dua sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapaun kegiatan lain dalam mendukung pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah adalah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Dikarenakan indikator tersebut merupakan kegiatan rutin, maka realisasi akan tercapai setelah Triwulan IV.

9. **Data Pokok Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani

Pemenuhan kebutuhan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah adalah kebutuhan kedinasan kepala daerah dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah dan terbayarnya iuran APKASI.

Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani adalah terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Rumus Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani yaitu Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani dibagi Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang dilayani dikali 100%.

Realisasi Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani pada Tahun 2023 Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.45

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2023
1	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani	1948	1489	789
2	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang Terlayani	1948	1489	789

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 Triwulan I adalah sebesar 100%.

Adapun untuk RKPD Tahun 2023 pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setda Temanggung indikator program berupa jumlah layanan kedinasan Kepala Daerah dan terlaksananya layanan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi. Dengan rincian output kegiatan berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, terpenuhinya kepesertaan apkasi, terselenggaranya

penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, serta terfasilitasinya keprotokolan

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Sekretariat Daerah dari 26 indikator terdapat 11 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Hal ini disebabkan karena Keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, capaian kinerja dari OPD belum maksimal. Penilaian dari Kemendagri terakhir keluar pada tahun 2018. Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 belum keluar, sehingga sampai saat ini data yang digunakan mengacu pada data tahun 2018.
 - Indikator Cakupan pilar batas yang terinventarisir
Hal ini disebabkan karena Keterbatasan anggaran yang tersedia dan lokasi yang sulit dijangkau
 - Indikator Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH
Hal ini disebabkan karena Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal
 - Indikator Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selesai tepat waktu
Hal ini disebabkan karena Mapping anggaran baik DAU (earmark) maupun DAK, Menunggu terbitnya petunjuk operasional DAK, Menunggu surat keputusan penetapan lokasi DAK, Menunggu kesiapan aplikasi E-Purchasing baik penyedia maupun ketersediaan barang/jasa, dan Proses perencanaan yang membutuhkan waktu

- Indikator Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan
Hal ini disebabkan karena Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan
- Indikator Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan
Hal ini disebabkan karena Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan
- Indikator Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Hal ini disebabkan karena Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan
- Indikator Indeks reformasi Birokrasi
Hal ini disebabkan karena Belum kuatnya komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi RB
- Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Hal ini disebabkan karena Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab. Temanggung
- Indikator Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah
Hal ini disebabkan karena Adanya perubahan kebijakan dan aplikasi baru yang dinamis dan merupakan kegiatan rutin yang akan tercapai sesuai target pada triwulan IV
- Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah
Hal ini disebabkan karena Adanya perubahan agenda kegiatan/acara pimpinan daerah dari rencana sebelumnya dan merupakan kegiatan rutin yang akan tercapai sesuai target pada triwulan IV

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, antara lain :

- Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
- Kurangnya SDM yang berkompeten
- Beberapa indikator merupakan kegiatan rutin sehingga target akan tercapai setelah triwulan IV

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar Sekretariat Daerah :

- Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang tersedia
- Meningkatkan kemampuan SDM
- Menyesuaikan rumus indikator berdasarkan bulan berjalan
- Meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- a. Bagian Pemerintahan usulan anggaran Rp 475.000.000,- dengan rincian Rp 440.000.000 untuk Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Rp 35.000.000,- untuk Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah;
- b. Bagian Kesra dan Bina Mental Usulan Anggaran sebesar Rp 2.888.300.000,- dengan rincian Rp 1.250.000.000,- untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Rp 388.300.000,- untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, dan Rp 1.250.000.000,- untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Bagian Hukum terdapat usulan penambahan anggaran dari Rp 1.425.738.600,- menjadi Rp 1.695.738.600,- pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebesar Rp 20.000.000 dalam rangka harmonisasi perbub ke provinsi, serta

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp 200.000.000,- untuk pendampingan hukum kegiatan pembangunan daerah oleh kejaksaan dan Rp 50.000.000 untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- d. Bagian Perekonomian dari usulan anggaran sebesar Rp 1.605.432.000,- menjadi sebesar Rp 1.106.744.500,- dengan rincian sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD menjadi Rp . 177.716.000, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sebesar Rp 57.716.000 serta Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan menjadi sebesar Rp 871.312.500,-
 - e. Bagian Pembangunan terdapat usulan penambahan anggaran dari Rp 150.000.000,- menjadi Rp 202.640.000,- dengan rincian usulan penambahan anggaran sebesar Rp 28.560.000,- pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dan Rp 24.080.000,- pada sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
 - f. Bagian PBJ terdapat usulan anggaran sebesar Rp. 276.068.400,- untuk sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 138.789.200,- sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebesar Rp 131.229.200 sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 6.050.000,-;
 - g. Bagian Umum terdapat usulan penambahan anggaran dari Rp. 25.026.953.973,- menjadi Rp 27.146.953.973,- pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Rp. 620.000.000 dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Pembayaran Sewa Tahan PT KAI) sebesar Rp 1.500.000.000,-;
 - h. Bagian Organisasi terdapat usulan penambahan anggaran dari Rp. 200.000.000,- menjadi Rp 353.000.000,- pada sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebesar Rp 47.000.000,-, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebesar Rp 20.000.000,- Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebesar Rp 32.000.000,- dan Sub

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah daerah sebesar Rp 54.000.000,-

- i. Bagian Prokompim terdapat usulan penambahan anggaran dari Rp 1.850.673.337,- menjadi Rp 2.722.173.337,- pada sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan sebesar Rp 411.500.000,-, Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan sebesar Rp 380.000.000,- dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan sebesar Rp 80.000.000,-

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.46 berikut:

Tabel 2.46
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH							1	SEKRETARIAT DAERAH						
A.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					475.000.000		A.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					475.000.000	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. TMG				440.000.000			Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. TMG				440.000.000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	64	Keg	30.000.000			Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	64	Keg	30.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	36 23	Keg Kelurahan	25.000.000			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	36 23	Keg Kelurahan	25.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 1	Dok Keg	385.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 1	Dok Keg	385.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. TMG				35.000.000			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. TMG				35.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	PKS	35.000.000			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	PKS	35.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.425.738.600		B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.695.738.600	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. TMG				1.425.738.600			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. TMG				1.695.738.600	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	111	Dok	50.000.000			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	111	Dok	70.000.000	Koordinasi harmonisasi Perbup 20.000.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30	Kasus	1.330.000.000			Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30	Kasus	1.580.000.000	Honorarium pendampingan hokum kegiatan pembangunan daerah 200.000.000 Bantuan hukum bagi masyarakat miskin 50.000.000
	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	111	Dok	45.738.600			Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	111	Dok	45.738.600	
C.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					2.888.300.000		C.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					2.888.300.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. TMG				2.888.300.000			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. TMG				2.888.300.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	Keg	1.250.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	Dok	1.250.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	Keg	388.300.000			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	dok	388.300.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	keg	1.250.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	dok	1.250.000.000	
D.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.605.432.000	D.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.106.744.500	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. TMG				235.432.000		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. TMG				235.432.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	dok	177.716.000		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	dok	177.716.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Laporan	57.716.000			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Laporan	57.716.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. TMG				1.370.000.000			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. TMG				871.312.500	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	dok	1.370.000.000			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	dok	871.312.500	
E	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					150.000.000		E	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					202.640.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. TMG				150.000.000			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. TMG				202.640.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dok	67,000,000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dok	95.560.000	Honorarium tim penyusun juklak APBD 4.810.000, Cetak Juklak APBD 23.750.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	laporan	83.000.000		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	laporan	107.080.000	Mamin RKPK 20.000.000 Mamin workshop simplerbangda 4.080.000
F	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (PBJ)					276.068.400	F	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PEREKONOMIAN DAERAH					276.068.400	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. TMG				276.068.400		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. TMG				276.068.400	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200	dok	138.789.200		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200	dok	138.789.200	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	200	dok	131.229.200		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	200	dok	131.229.200	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	103	org	6.050.000			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	103	org	6.050.000	
G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					200.000.000		G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					353.000.000	
	Penataan Organisasi	Kab. TMG				200.000.000			Penataan Organisasi	Kab. TMG				353.000.000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dok	53.000.000			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dok	100.000.000	Honorarium tim penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 47.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	keg	80.000.000			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	keg	100.000.000	Honor narsum Bimtek Layanan Prima 15.000.000 Sosialisasi Pelayanan 5.000.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Keg	18.000.000			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Keg	50.000.000	Honorarium dan akomodasi sosialisasi budaya kerja 32.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Keg	12,000,000		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Keg	12,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	dok	37,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	dok	91.000.000	Fullboard penyusunan LKJIP 54.000.000
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.850.673.337	H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.722.173.337	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. TMG				600.000.000		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. TMG				600.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160	Org/bln	600,000,000		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160	Org/bln	600,000,000	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. TMG				1.250.673.337		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. TMG				2.122.173.337	

RANCANGAN AWAL RKPd 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500	Laporan	300.673.337		Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500	Laporan	712.173.337	Buku profil 45.000.000 Mamin tamu 300.000.000 BBM 66.500.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2000	Laporan	650.000.000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2000	Laporan	1.030.000.000	Apkasi 30.000.000 Mamin tamu 150.000.000 SPPD 200.000.000
	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	800	laporan	300.000.000		Pendokumentasia n Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	800	laporan	380.000.000	Rak arsip 15.000.000 Kamera 65.000.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.026.953.973	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.146.953.973	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. TMG				14.328.710.810		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. TMG				14.328.710.810	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	ob	14.328.710.810		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124	ob	14.328.710.810	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. TMG				100.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. TMG				100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	200	stel	100.000.000			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	stel	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. TMG				2.051.100.000			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. TMG				2.051.100.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	100.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	100.000.000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	120.000.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	120.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	200.000.000			Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUnda ngan yang Disediakan	12	dokumen	50.000.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUnd angan yang Disediakan	12	dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	1.000.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	1.000.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	481.100.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	481.100.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. TMG				200.000.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. TMG				820.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	unit	-			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	unit	-	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	unit	-			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	unit	620.000.000	Pengadaan 2 unit kendaraan station wagon untuk pool Setda
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	unit	100.000.000			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	unit	100.000.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. TMG				4.396.394.000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. TMG				5.896.394.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	lap	15.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	lap	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	1.098.400.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	1.098.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	3.282.994.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	4.782.994.000	Usulan penambahan Rp 1.500.000.000 untuk pembayaran sewa tanah PT KAI
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. TMG				1.805.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. TMG				1.805.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	unit	250.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	unit	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	750.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	750.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	120	unit	85.000.000		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	120	unit	85.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79	unit	100.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79	unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	unit	20.000.000		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	unit	20.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	6	unit	600.000.000		Pemeliharaan/Reh abilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	6	unit	600.000.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. TMG				509.749.163		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. TMG				509.749.163	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	ob	169.749.163		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	ob	169.749.163	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50	Paket	300.000.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50	Paket	300.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	org	40.000.000		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	org	40.000.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. TMG				1.636.000.000		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. TMG				1.636.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	paket	354.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	paket	354.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	paket	282.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	paket	282.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	paket	1.000.000.000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	paket	1.000.000.000	

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 .47
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Inovasi aplikasi simpelba ngda	Bagian Pembangunan	APBD	Pelaporan realisasi fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah secara online	Laporan bulanan realisasi fisik dan realisasi keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Pambang unan /2020
2	Pembinaa n Rutin BUMD Kab. Temangg ung	Bagian Perekonomian	APBD	Pembinaan terhadap masing-masing BUMD di Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambung an	Rencana Kerja oleh BUMD dan laporan pembinaan	Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada audit KAP terhadap Laporan Keuangan BUMD Kab. Temanggung	Bagian Perekono mian- 2020- 2022

2.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Sekretariat Daerah ada 2 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.48
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan JDIH Kabupaten Temanggung sebagai Pengelola JDIH dengan Progres Pencapaian Terbaik Tahun 2023	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
2	Penghargaan Kabupaten Peduli HAM 2020	Menteri Hukum dan HAM	Nasional	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang secara tidak langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, EKPPD, Pilar Batas, maupun AKIP. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui pelaporan SPM, penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah, inventarisir pilar batas dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah dalam rangka akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

VISI SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2005-2025 Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera						
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024
Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100
				persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100
				persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	%	85

		bina mental spiritual		kondisi baik		
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100
				persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100
				persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100
				persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100
		Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100
				persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100
				persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	66,67

			Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	100
				persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100
				persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	95
				persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	95
				persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	30
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	17,39

		Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	475.000.000	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	474.971.100	28.900
	Administrasi Tata Pemerintahan	440.000.000		Administrasi Tata Pemerintahan	426.471.000	13.529.000
	Penataan Administrasi Pemerintahan	30.000.000		Penataan Administrasi Pemerintahan	25.234.000	4.766.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	25.000.000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	29.766.000	(4.766.000)
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	385.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	371.471.000	13.529.000
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	35.000.000		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	48.500.100	(13.500.100)
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	35.000.000		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	48.500.100	(13.500.100)
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.695.738.600	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.695.738.600	0
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.695.738.600		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.695.738.600	0
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	70.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	70.000.000	0
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.580.000.000		Fasilitasi Bantuan Hukum	1.580.000.000	0
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	45.738.600		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	45.738.600	0
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.888.300.000	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	30.357.615.000	(27.469.315.000)
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.888.300.000		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30.357.615.000	(27.469.315.000)
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.250.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.250.000.000	0
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	388.300.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	27.857.615.000	(27.469.315.000)
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.250.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.250.000.000	0

4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.106.744.500	4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.106.744.500	0
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	235.432.000		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	235.432.000	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	177.716.000		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	177.716.000	0
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	57.716.000		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	57.716.000	0
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	871.312.500		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	871.312.500	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	871.312.500		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	871.312.500	0
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	202.640.000	5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	202.640.000	0
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	202.640.000		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	202.640.000	0
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	95.560.000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	95.560.000	0
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	107.080.000		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	107.080.000	0
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PEREKONOMIAN DAERAH	276.068.400	6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PEREKONOMIAN DAERAH	276.068.400	0
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	276.068.400		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	276.068.400	0
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	138.789.200		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	141.817.200	(3.028.000)
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	131.229.200		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120.612.200	1.0617.000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6.050.000		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	13.639.000	(7.589.000)
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	353.000.000	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	341.000.000	12.000.000
	Penataan Organisasi	353.000.000		Penataan Organisasi	341.000.000	12.000.000
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000	0
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000	0
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.000.000		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.000.000	0
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12.000.000		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	12.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	91.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	91.000.000	0
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.722.173.337	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.722.173.200	137

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	0
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000	0
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.122.173.337		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.122.173.200	137
	Fasilitasi Keprotokolan	712.173.337		Fasilitasi Keprotokolan	712.173.200	137
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.030.000.000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.030.000.000	0
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	380.000.000		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	380.000.000	0
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.146.953.973	9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.853.042.001	(6.706.088.028)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.328.710.810		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.328.710.810	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.328.710.810		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.328.710.810	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.997.000	3.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.997.000	3.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.051.100.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.077.997.500	(26.897.500)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.900.000	(26.900.000)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.100.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.097.500	2.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	820.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.499.883.028	(6.679.883.028)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.799.998.928	(6.799.998.928)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	620.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.999.500	120.000.500
	Pengadaan Mebel	100.000.000		Pengadaan Mebel	99.992.600	7.400

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.896.394.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.994.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.805.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000.000
	Pemeliharaan Mebel	85.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.749.163
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.749.163
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.636.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	354.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.000.000.000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.892.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.896.394.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.994.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.804.457.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.999.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.994.000
	Pemeliharaan Mebel	84.928.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.645.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.991.600
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.749.163
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.749.163
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.635.852.900
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	353.852.900
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.000.000.000

1.108.000
0
0
0
0
542.400
1.000
6.000
72.000
355.000
100.000
8.400
0
0
0
147.100
147.100
0
0

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas secara keseluruhan untuk Sekretariat Daerah dapat diketahui bahwa pagu pada tahun 2024 sebesar Rp 71.029.992.801,- dan anggaran DBHCHT sebesar Rp. 871.312.500,-

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEMERINTAHAN						474.971.100,00							482.978.693,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						474.971.100,00							482.978.693,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						474.971.100,00							482.978.693,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase dokumentasi perundangan melalui JDHI persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi persentase Kerjasama yang diimplementasikan persentase Pelaporan SPIII Perangkat Daerah tepat Waktu persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi "persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi " persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPB dan LKPD tepat waktu persentase produk hukum yang difasilitasi persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	100% 90% 100% 60% 100% 1												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kemasyarakatan	12 Dokumen	-	-	1 Dokumen	29.788.000,00	Kab. Ternate, Seluruh Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkat an reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Dokumen	25.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	-	-	0 Dokumen	371.471.000,00	Kab. Ternate, Seluruh Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkat an reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	6 Dokumen	385.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
-	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12Dokumen	-	-	12 Dokumen	48.500.100,00	-	-	-	4. Perbaikan sistem kelola pemerintah an yang adept dan kolaboratif 3. Peningkat an reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12Dokumen	35.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12Dokumen	-	-	0 Dokumen	43.500.100,00	Kab. Ternate, Seluruh Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan sistem kelola pemerintah an yang adept dan kolaboratif 3. Peningkat an reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12Dokumen	35.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengeluaran Informasi Hukum yang Didokumentasi	111 Dokumen			111 Dokumen	45.726.600,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	111 Dokumen	50.706.600,00	BAGIAN HUKUM
			Jumlah Kasus yang Menghasilkan Fasilitas Bantuan Hukum	30 Kasus			30 Kasus	1.580.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	30 Kasus	1.330.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	-	-														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	111 Dokumen			111 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	111 Dokumen	50.000.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	15	6	17
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL						31.502.615.000,00							2.890.970.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						31.502.615.000,00							2.890.970.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						31.502.815.000,00							2.890.970.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						31.502.615.000,00							2.890.970.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						31.502.615.000,00				2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif sosial inklusif dan merata. 1. Pening- katan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Keselamatan, Pendidikan, sosial, dan pemukimahan dan pemuk- iman, dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan pengi- katan rata-rata kualitas sekolah dan harapan		2.890.970.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 01 02 2 02 000	Hasil Uji Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	1.250.000.000,00	Kab: Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UM/UM-DANA ALOKASI UMUM	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih prima, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman, dalam rangka percepatan perubahan saling, percepatan perubahan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan terapan			1.252.870.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	29.002.615.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UM-UM-DANA ALOKASI UMUM	2. Peningk atan kualitas sumbar daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptil secara inklusif dan merata 1. Pening katan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan perumahan dan permuk imatan, dalam rangka percepatan perubahan stunting, percepatan perubahan konstruksi ekstrem, dan pening katan rata-rata lama sekolah dan harapan		888.300.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Keluarga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keagamaan, Transhumansi				1 Dokumen	1.250.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UM/UM-DANA ALOKASI UMUM	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih prima, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman, iman, dalam rangka percepatan perumahan stunting, percepatan perumahan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan		1.250.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEREKONOMIAN					1.106.744.500,00							0,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					1.106.744.500,00							0,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					1.106.744.500,00							0,00		
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100%		-	1.106.744.500,00							100% 80% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 60% 100%	0,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		14Dokumen			235.432.000,00							14Dokumen	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan			2 Laporan	97.716.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER JUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Laporan	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	-	-														
			0	12 Dokumen			0,00	177.716.000,00	-	DANA TRANSFER JUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Dokumen	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04	Pemertuan Kebijakan Sumber Daya Alam		2Dokumen				871.312.500,00						2Dokumen	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Peningkatan Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen			5 Dokumen	871.312.500,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DBH LUKAI IASIL LEMEKAJ (OHT)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEMBANGUNAN						202.640.000,00							154.157.500,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						202.640.000,00							154.157.500,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						202.640.000,00							154.157.500,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100%			-	202.640.000,00						100% 80% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 60% 100%	154.157.500,00	
	4.01.03.2.02	Polaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengkajian dan Evaluasi Program Pembangunan	101 Laporan			1 Dokumen 7 Laporan	202.640.000,00			4. Perbaikan tata kelola pemerintah yang adaptif dan koheren 3. Peningkat an per koordinasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Tembung	101 Laporan	154.157.500,00	BAGIAN PEMBANGUNAN	
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	95.560.000,00	- Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah yang adaptif dan koordinatif 3. Pemertan per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Temanggung	1 Dokumen	70.000.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100 Laporan			4 Laporan	107.080.000,00	- Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah yang adaptif dan koordinatif 3. Pemertan per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Temanggung	100 Laporan	84.157.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	7
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						276.068.400,00							276.068.400,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						276.068.400,00							276.068.400,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						276.068.400,00							276.068.400,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100%			-	276.068.400,00						100% 80% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 60% 100%	276.068.400,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		12Bulan				276.068.400,00				4. Pemakaian tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik		12Bulan	276.068.400,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	-														
			Jumlah Dokumen / Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen			109 Dokumen	141.817.200,00	- Kab. Ternagagung, Semua Kacamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER JUMUD-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik		12 Dokumen	141.817.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	103 Orang			103 Orang	13.639.000,00	Kab. Ternangung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adipril dan ka skorati 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	103 Orang	13.639.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	134 Dokumen			253 Dokumen	120.812.200,00	Kab. Ternangung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adipril dan ka skorati 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	134 Dokumen	120.812.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN UMUM						33.853.042.001,00							25.062.342.010,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						33.853.042.001,00							25.062.342.010,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						33.853.042.001,00							25.062.342.010,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	33.853.042.001,00						-	25.062.342.010,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Parangkat Daerah		125Orang/ Bulan				14.328.710.810,00				4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan keagoradif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		125Orang/ Bulan	14.328.710.810,00	BAGIAN UMUM
	-	-														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan			124 Orang/bulan	14.328.710.810,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA A OKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan keagoradif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	125 Orang/bulan	14.328.710.810,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kopogawasan Parangkat Daerah	-	134stol			-	99.997.000,00				4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan keagoradif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	134stol	100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Paksiat Dinas beserta Alotrib Kelengkapan	134 Paket			134 Paket	99.997.000,00	Kab. Tamanungung, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA Alokasi UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adeprit dan koordinasi 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	134 Paket	100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7paket			-	2.077.997.500,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adeprit dan koordinasi 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	7paket	2.063.488.037,00	BAGIAN UMUM
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disiapkan	12 Paket			12 Paket	200.000.000,00	Kab. Tamanungung, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA Alokasi UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adeprit dan koordinasi 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Paket	200.000.000,00	BAGIAN UMUM
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Persister, dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	126.900.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Paket	100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	-	-														
			Jumlah Laporan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	481.057.500,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Laporan	400.488.000,00	BAGIAN UMUM
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Dokumen	50.000.000,00	BAGIAN UMUM
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	120.000.000,00	Kab. Tembunggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan ko-soratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Paket	120.000.000,00	BAGIAN LUMUM
-	-	-														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	1.000.000.000,00	- Kab. Tembunggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan ko-soratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Laporan	1.000.000.000,00	BAGIAN LUMUM
-	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Insulasi Listrik, Penerangan, Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	100.000.000,00	- Kab. Tembunggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan ko-soratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Paket	100.000.000,00	BAGIAN LUMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3paket				7.499.883.026,00				4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan ko-soratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik		3paket	200.000.000,00	BAGIAN UMUM
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				15 Unit	6.799.998.926,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan ko-soratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BAGIAN UMUM
	*	*														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit			24 Unit	99.992.600,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan ko-soratif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	20 Unit	100.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			8 Unit	89.692.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA A. OKASI UMUM	-	4. Perbaikan s.a. kelola pemerintah an yang adaptif dan kuadernil 3. Pementa per reformasi birokrasi melalui per ingkatan kualitas pelayanan publik	-	5 Jnit	100.000.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan yang Disediakan				1 Unit	499.599.500,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA A. OKASI UMUM	-	4. Perbaikan s.a. kelola pemerintah an yang adaptif dan kuadernil 3. Pementa per reformasi birokrasi melalui per ingkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.05		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar	-	12Rulan			-	5.898.394.000,00			-	3. Pementa per reformasi birokrasi melalui per ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12Rulan	4.398.394.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	4.782.994.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA A. OKASI UMUM		3. Pementa per reformasi birokrasi melalui per ingkatan kualitas pelayanan publik		12 Laporan	3.282.994.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.098.400.000,00	Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Keld Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkat- an reformasi birokrasi melalui pen- ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Laporan	1.098.400.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sirel Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Keld Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkat- an reformasi birokrasi melalui pen- ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Laporan	15.000.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6paket			-	1.904.457.600,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah- an yang adept dan koordinatif 3. Peningkat- an reformasi birokrasi melalui pen- ingkatan kualitas pelayanan publik	-	6paket	1.905.000.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Asat Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	19.800.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua Keld Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah- an yang adept dan koordinatif 3. Peningkat- an reformasi birokrasi melalui pen- ingkatan kualitas pelayanan publik	-	1 Unit	20.000.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mobil yang Dipelihara	200 Unit			12 Unit	84.928.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan sara kelola pemerintah an yang adaptif dan koordinatif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	200 Unit	75.000.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	12 Unit			12 Unit	749.994.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan sara kelola pemerintah an yang adaptif dan koordinatif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Unit	750.000.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit			12 Unit	249.999.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan sara kelola pemerintah an yang adaptif dan koordinatif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	6 Unit	250.000.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit			12 Unit	599.991.800,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningc per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	8 Unit	700.000.000,00	BAGIAN UMUM
-	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlukan	150 Unit			12 Unit	99.645.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER LUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan sarana kelola pemerintah yang ada/pil dan kelDesa 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	150 Unit	100.000.000,00	BAGIAN LUMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	16Orang/ Bulan 2Orang/ Bulan			-	509.749.163,00			-	3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	16Orang/ Bulan 2Orang/ Bulan	509.749.163,00	BAGIAN LUMUM
	-	-														
			Jumlah Paket Paketan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Diperlukan	60 Paket			60 Paket	800.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER LUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	60 Paket	800.000.000,00	BAGIAN LUMUM
	-	-														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan	169.749.163,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER LUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	2 Orang/Bulan	169.749.163,00	BAGIAN LUMUM
	-	-														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang			2 Orang	40.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER LUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	2 Orang	40.000.000,00	BAGIAN LUMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah	-	36paket			-	1.655.652.900,00			-	3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	36paket	1.562.000.000,00	BAGIAN LUMUM
	-	-														
			Jumlah Paket Kebutuhan Humas, Tenaga Kepala Daerah yang Disiapkan	12 Paket			12 Paket	262.000.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua KakiDaerah	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Paket	262.000.000,00	BAGIAN LUMUM
	-	-														
			Jumlah Paket Kebutuhan Humas, Tenaga Sekretariat Daerah yang Disiapkan	12 Paket			12 Paket	1.000.000.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua KakiDaerah	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan koordinatif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Paket	1.000.000.000,00	BAGIAN LUMUM
	-	-														
			Jumlah Paket Kebutuhan Humas, Tenaga Kepala Daerah yang Disiapkan	12 Paket			12 Paket	353.652.900,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua KakiDaerah	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan koordinatif 3. Pemerta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	12 Paket	300.000.000,00	BAGIAN LUMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN ORGANISASI						341.000.000,00						225.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						341.000.000,00							225.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						341.000.000,00							225.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	341.000.000,00						-	225.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Pemetaan Organisasi		10Dokumen			-	341.000.000,00				3. Pemerta- pan reformasi birokrasi melalui per- ingkatan kualitas pelayanan publik	10Dokumen	225.000.000,00		
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pengelompokan Kolaborasi, dan Analisis Jabatan	2 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemerta- pan reformasi birokrasi melalui per- ingkatan kualitas pelayanan publik	-	2 Dokumen	75.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	-	-														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	91.000.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemerta- pan reformasi birokrasi melalui per- ingkatan kualitas pelayanan publik	-	2 Dokumen	50.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
			Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan			2 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemerta- pan reformasi birokrasi melalui per- ingkatan kualitas pelayanan publik	-	2 Laporan	80.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	-	-														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Ternanggung, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemerta- pan reformasi birokrasi melalui per- ingkatan kualitas pelayanan publik	-	2 Dokumen	20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						2.722.173.200,00						3.050.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.722.173.200,00							3.050.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.722.173.200,00							3.050.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-			-	2.722.173.200,00						-	3.050.000.000,00	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	16Orang/ Bulan 2Orang/ Bulan				600.000.000,00			-	3. Pemanta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	16Orang/ Bulan 2Orang/ Bulan	600.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16 Orang/Bulan			16 Orang/Bulan	600.000.000,00	- Kab. Tanggung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	16 Orang/Bulan	600.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	3300Laporan			-	2.122.173.200,00			-	4. Perbaikan cara kolola pemerntah an yang adaptif dan koordinatif 3. Pemanta per reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	3300Laporan	2.450.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	800 Laporan			800 Laporan	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan transparan 3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	800 Laporan	400.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2000 Laporan			2000 Laporan	1.050.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan transparan 3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	2000 Laporan	1.300.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500 Laporan			500 Laporan	712.173.200,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	500 Laporan	750.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Temanggung, 3 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebesar 95,57% dengan rincian anggaran sebesar Rp. 71.890.951.668,- dan realisasi sebesar Rp. 68.703.701.248,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan I sebesar 27,46 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 71.029.992.801,- dan anggaran DBHCHT sebesar Rp. 871.312.500,- yang terdiri dari 3 program antara lain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680119 199311 1 001